

**IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
TERHADAP PENANGANAN KEMISKINAN PENDUDUK DI
KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

Nama : Fildzah Syafira Al-Hamid
Npm : 1805180017
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **MARWAH AZZAHRA**
N P M : **1805160581**
Program Studi : **MANAJEMEN**
Judul Skripsi : **PENGARUH *QUALITY OF WORK LIFE* DAN *WORK ENGAGEMENT* TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PEGADAIAN KANTOR CABANG KUALA SIMPANG**

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan, untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. JUFRIZEN, S.E., M.Si.)

Penguji II

(EFRI KURNIA, S.E., M.M.)

Pembimbing

(RINI ASTUTI, S.E., M.Si.)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : MARWAH AZZAHRA
N P M : 1805160581
Program Studi : MANAJEMEN
Konsentrasi : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Judul Skripsi : PENGARUH QUALITY OF WORK LIFE DAN WORK
ENGAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.
PEGADAIAN KANTOR CABANG KOTA KUALA SIMPANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Pembimbing Skripsi



RINI ASTUTI, SE., MM

Diketahui/Disetujui

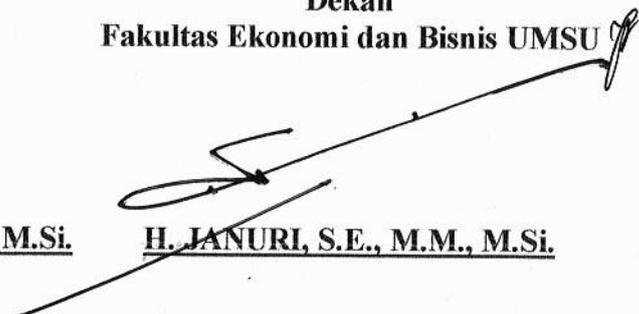
Oleh:

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



JASMAN SARIPUDDIN HASIBUAN, S.E., M.Si.



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marwah Azzahra
NPM : 1805160581
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia
Dosen Pembimbing : Rini Astusti, SE., M.M
Judul Penelitian : Pengaruh Quality of Work Life dan Work Engagement Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kota Kuala Simpang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki identifikasi masalah, begitu juga dengan batasan masalah, sesuaikan kembali dengan penulisan.	5/8-22	Ri
Bab 2	Perbaiki sistematika penulisan bab 2 tambah penulisan footnote.	19/8-22	Ri
Bab 3	Pada tabel instruksi tambah nomor paragraf yg urut & singkat tambahkan uji validitas & reliabilitas.	23/8-22	Ri
Bab 4	Jelaskan hasil penelitian, mulai dari responden uji validitas & reliabilitas, serta pembatasan tambahkan referensi yg mendukung.	26/8-22	Ri
Bab 5	Kesimpulan di isi dengan hasil penelitian yg & hasilnya, berikan saran bagi PT. Pegadaian terkait variabel yg kamu teliti.	5/9-22	Ri
Daftar Pustaka	Jelaskan referensi yang tercantum & daftar pustaka, susunlah berdasarkan	9/9-22	Ri
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace Sidang Meja Hijau	13/9-22	Ri

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Medan, 13 September 2022

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

JASMAN SARIPUDDIN HSB, S.E., M.Si

RINI ASTUSTI, SE., M.M

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : MARWAH AZZAHRA
NPM : 1805160581
Konsentrasi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan. September 2022

Pembuat Pernyataan



MARWAH AZZAHRA

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Fildzah Syafira Al-Hamid (1805180017)

“Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Penanganan Kemiskinan Penduduk Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi SDGs terhadap penanganan kemiskinan penduduk di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.. Tingkat Kemiskinan (Y) sebagai variabel terikat. Pendapatan Utama, Tingkat Pendidikan , Jumlah Tanggungan Keluarga Dan Kondisi Tempat Tinggal (X) sebagai variabel bebas di dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Probability Sampling* dan di peroleh sampel sebanyak 40 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil penyebaran angket (kuesioner) dan data skunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat.

Penelitian ini menggunakan metode analisa faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Pendapatan Utama, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Tanggungan Keluarga berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Faktor Kondisi Tempat Tinggal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Langkat terus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dengan berbagai kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus .

Kata Kunci: *Kemiskinan, Pendapatan, Pendidikan, Jumlah Tanggungan Keluarga, dan Kondisi Tempat Tinggal.*

ABSTRACT

Fildzah Syafira Al-Hamid (1805180017)

“Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Penanganan Kemiskinan Penduduk Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat”

This study aims to see how the implementation of the SDGs on handling population poverty in West Brandan District, Langkat Regency. Poverty Rate (Y) as a bound variable. Primary Income, Education Level, Number of Family Dependents And Conditions of Residence (X) as free variables in this study.

The sampling technique used the Probability Sampling method and a sample of 40 respondents was obtained. The type of data used is primary data sourced from the results of the distribution of questionnaires (questionnaires) and skunder data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of Langkat Regency.

This study used a factor analysis method. The results showed that the Main Income Factors, Education Level, and Number of Family Dependents influenced and significantly affected the Poverty Rate in coastal villages of West Brandan District, Langkat Regency. The Condition of Residence factor has no effect on the Poverty Rate. The condition of poverty in Langkat Regency continues to increase caused by the Covid-19 Pandemic with various policies pursued by the government to suppress the spread of the virus.

Keywords: *Poverty, Income, Education, Number of Family Dependents, and Conditions of Residence.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Penanganan Kemiskinan Penduduk Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat”**

”Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan Proposal ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu saya Vanda Anwar yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi perempuan hebat dan kuat selama hidup saya, oma dan opa yang memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.
3. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Dr Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra. Lailan Safina Hasibuan M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi masukan kepada saya dengan penuh kesabaran membimbing saya.
8. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
9. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik .

10. Kepada seluruh saudara - saudara saya (Fanny Afifah Al-Hamid, Arif Sembiring, Fadhli Fakhriansyah Al-Hamid, Fabian Basyir Al-Hamid) yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan saya (Fia, Salsa, Fariz, Dara, Rizana, dan Erike) serta rekan sekelas masa perkuliahan, dan teman-teman dekat saya yang telah memberi informasi mengenai perkuliahan, dan memberi semangat kepada saya.
12. Kepada sahabat saya (Vingka Tusliyana) yang selalu memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan dalam penulisan proposal ini. Terimakasih , Wassamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, September 2022

Penulis

Fildzah Syafira Al-Hamid

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	30
1.3 Batasan Masalah.....	30
1.4 Rumusan Masalah.....	31
1.5 Tujuan Penelitian.....	31
1.6 Manfaat Penelitian.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
2.1 Landasan Teoritis.....	33
2.1.1 Pembangunan Ekonomi.....	33
2.1.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Klasik.....	34
2.1.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery.....	37
2.1.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi Rei-Ranis.....	39
2.1.2 Kemiskinan Dan Ketimpangan.....	41
2.1.2.1 Definisi Kemiskinan.....	41
2.1.2.2 Jenis-Jenis Kemiskinan.....	41
2.1.2.3 Penyebab Kemiskinan.....	42
2.1.2.4 Indikator Kemiskinan.....	44
2.1.2.5 Kriteria Kemiskinan.....	45
2.1.2.6 Mengukur Kemiskinan Dan Ketimpangan.....	46

2.2 Penelitian Terdahulu.....	48
2.3 Regulasi / Kebijakan Pemerintah.....	49
2.3.1 SDGs.....	49
2.3.2 Kemiskinan Ektrem.....	52
2.4 Tahapan Penelitian.....	54
2.4.1 Kerangka Analisis Penelitian.....	54
2.4.2 Kerangka Konseptual.....	55
2.5 Hipotesa.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1 Jenis Penelitian.....	56
3.2 Definisi Operasional.....	56
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	57
3.3.1 Tempat Penelitian.....	57
3.3.2 Waktu Penelitian.....	57
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	57
3.4.1 Jenis Data.....	57
3.4.2 Sumber Data.....	58
3.5 Populasi Dan Sampel.....	58
3.5.1 Populasi.....	58
3.5.2 Sampel.....	58
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.6 Teknik analisis penelitian.....	59
3.7.1 Analisis Deskriptif.....	59
3.7.2 Metode Analisis Faktor.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Gambaran umum Kabupaten Langkat.....	64
4.1.1 Kondisi geografi.....	64
4.1.2 Kondisi pemerintahan.....	65

4.1.3 Kondisi demografi.....	67
4.1.4 Kondisi ekonomi.....	70
4.1.5 Kondisi sosial.....	76
4.2 Analisis perkembangan Number of poor people , Head Count Index Poverty Gap Index, Poverty Severity Index di Kabupaten Langkat sebelum dan setelah Pandemi Covid-19.....	80
4.3 Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa Terhadap Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Di Desa Pesisir Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.....	85
4.3.1 Deskripsi Karakteristik Responden.....	85
4.3.2 Data Identitas Responden.....	86
4.3.3 Kemudahan Penggunaan.....	89
4.3.4 Pemenuhan Kebutuhan Dasar.....	92
4.3.5 Penyaluran Bantuan.....	95
4.4 Analisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan penduduk di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.....	97
4.4.1 Convergent Validity.....	97
4.4.2 Discriminante Validity.....	105
4.4.3 Composite Reliability.....	106
4.4.4 Evaluasi Model Struktural (inner model).....	107
4.4.5 Pengujian Hipotesis Hasil Penelitian.....	108
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peresentase Penduduk Miskin Pedesaan Dan Perkotaan, September 2020-September 2021	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 3.1 Definisi Operasional	56
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Langkat.....	66
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Langkat.....	67
Tabel 4.3 Indikator Kependudukan Kabupaten Langkat.....	68
Tabel 4.4 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.....	69
Tabel 4.5 Jumlah Nilai PDRB Kabupaten Langkat.....	70
Tabel 4.6 Peranan PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019-2021.	71
Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha	73
Tabel 4.8 Nilai PDRB Perkapita di Kabupaten Langkat 2019-2021.....	74
Tabel 4.9 Statistik Gini Ratio Perkapita Kabupaten Langkat.....	75
Tabel 4.10 APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Langkat tahun 2022	76
Tabel 4.11 Statistik Tenaga Kesehatan Kabupaten Langkat.....	77
Tabel 4.12 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Langkat.....	77
Tabel 4.13 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Langkat (km) 2019-2021.....	78
Tabel 4.14 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Langkat.....	80
Tabel 4.15 Perbandingan indikator kemiskinan di Kabupaten Langkat , Provinsi Sumatera Utara Dan Indonesia sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19.....	82
Tabel 4.16 Karakteristik Responden.....	85
Tabel 4.17 <i>Convergent Validity Faktor Kemiskinan</i>	98
Tabel 4.18 <i>Convergent Validity Pada Pendapatan Utama</i>	99
Tabel 4.19 <i>Convergent Validity Pada Tingkat Pendidikan</i>	99

Tabel 4.20 <i>Convergent Validity</i> Pada Jumlah Tanggungan Keluarga	100
Tabel 4.21 <i>Convergent Validity</i> pada tempat tinggal	100
Tabel 4.22 <i>Convergent Validity</i> Faktor Kemiskinan.....	103
Tabel 4.23 <i>Convergent Validity</i> Pada Pendapatan Utama	103
Tabel 4.24 <i>Convergent Validity</i> Pada Tingkat Pendidikan	104
Tabel 4.25 <i>Convergent Validity</i> Pada Jumlah Tanggungan Keluarga	104
Tabel 4.26 <i>Convergent Validity</i> Pada tempat tinggal	105
Tabel 4.27 <i>Discriminante Validity</i> Pada <i>Avarage Extracted (AVE)</i>	106
Tabel 4.28 <i>Composite Reability</i>	106
Tabel 4.29 <i>R- Square</i>	107
Tabel 4.30 Uji Hipotesis	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2014-2021 (%Populasi)	9
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia 2014-2021 (Juta Orang).....	10
Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Kemiskinan Di Sumatera Utara Maret 2017– September 2021.....	10
Gambar 1.4 Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Langkat Maret 2010 – September 2020.....	12
Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2021	14
Gambar 1.6 Pencapaian Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021.....	16
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse	44
Gambar 2.2 Kurva Lorenz.....	47
Gambar 2.3 Tahapan Penelitian	55
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual.....	56
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Langkat.....	63
Gambar 4.2 Piramida Penduduk Kabupaten Langkat 2021.....	67
Gambar 4.3 IPM Kabupaten Langkat 2020-2021.....	78
Gambar 4.4 Poverty Severity Index (indeks kedalaman kemiskinan) dan Poverty Gap Index (indeks keparahan kemiskinan) di Kabupaten Langkat , Provinsi Sumatera Utara Dan Indonesia.....	82
Gambar 4.5 Jenis Kelamin.....	85

Gambar 4.6 Usia.....	85
Gambar 4.7 Pendidikan.....	86
Gambar 4.8 Pekerjaan.....	86
Gambar 4.9 Penerima Bantuan.....	87
Gambar 4.10 Program BLT-Dana Desa Yang Telah Berjalan Mampu Mengentaskan Kemiskinan.....	88
Gambar 4.11 Prosedur BLT-Dana Desa Mudah Dipahami.....	88
Gambar 4.12 Program BLT-Dana Desa Sangat Membantu Memenuhi Kebutuhan Pokok Sehari-Hari.....	89
Gambar 4.13 Program BLT-Dana Desa Menambah Pemenuhan Untuk Menabung Bagi Penerima Setiap Bulannya.....	90
Gambar 4.14 Program Bantuan Pemerintah Lain Lebih Berpengaruh Dalam Program Pengentasan Kemiskinan.....	90
Gambar 4.15 Program BLT-Dana Desa mampu untuk meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Bagi Penerima.....	91
Gambar 4.16 Program BLT-Dana Desa mampu untuk meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Bagi Penerima.....	92
Gambar 4.17 Program BLT-Dana Desa Telah Mampu Untuk Meningkatkan Pemenuhan Penghasilan Tetap/Pekerjaan Bagi Penerima.....	92
Gambar 4.18 Program BLT-Dana Desa Mampu Meningkatkan Pemenuhan Pendidikan Untuk Anggota Keluarga.....	93

Gambar 4.19 Penyaluran Dana Program BLT-Dana Desa Sudah Tepat Waktu...	94
Gambar 4.20 Pembagian Dana Program BLT-Dana Desa Dilakukan Secara Merata Kepada Rumah Tangga Miskin.....	94
Gambar 4.21 Program BLT-Dana Desa Sesuai Dengan Harapan Rumah Tangga Miskin.....	95
Gambar 4.22 Pemotongan Dana Program BLT-Dana Desa Dapat Membantu Warga Lainnya Yang Tidak Terdaftar Sebagai Penerima.....	96
Gambar 4.23 First Outer Loading.....	100
Gambar 4.24 Second Outer Loading.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Todaro,1999).

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan perkotaan maupun di perdesaan yang meresahkan masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan karena pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, mananggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran dalam pembangunan bagi negara berkembang pembangunan manusia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi (Ginting,2008).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Menurut Todaro, pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan manusia merupakan proses agar mampu memiliki lebih banyak pilihanm khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Proses pembangunan memiliki bebrapa tujuan meliputi berbagai perubahan pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Komponen dasar atau nilai inti tujuan keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain cukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*), merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat dalam memilih berbagai variabel pilihan yang ada. Disadari atau tidak kemiskinan dan kemakmuran sering kali berdampingan di suatu wilayah bahkan di dalam suatu negara yang makmur sekalipun, kemiskinan dapat diukur dengan melihat perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sehari-hari.

Kemiskinan secara umum adalah keadaan dimana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan seperti pakaian, tempat berlindung, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan merupakan salah satu indikator permasalahan yang dihadapi pada setiap Negara dan sudah menjadi masalah global. Negara yang sudah maju pada

umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada Negara yang masih berkembang seperti Indonesia.

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut Antara lain : terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social-politik (Bappenas,2004)

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensial sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus ditempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat,2015)

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. (Yacoub,2012). (*world bank* ,2004)

salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Indikator- indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan perkapita, dan distribusi pendapatan. Tolak ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil di muka hukum dan sebagainya. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu data yang tersedia dapat membuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah

tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu, data yang tersedia dapat membuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan penyajian data jumlah dan persentase penduduk miskin, informasi yang tidak kalah pentingnya adalah profil kemiskinan. Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penangan masalah kemiskinan, dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan juga tepat sasaran.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat, Sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata (Arifianto & Setiyono,2013).Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah (Kurniawan,2009).

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang berusaha untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia bahwa setiap dekade strategi

pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan dengan strategi pengentasan kemiskinan yang dibagi menjadi dua yakni: pertama melindungi keluarga dengan dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara , kedua membantu masyarakat yang mengalami kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Terdapat dua kondisi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Indonesia, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena imbas dari para birokrat kurang kompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia sehingga mengakibatkan susah untuk keluar dari masalah kemiskinan tersebut.

Penyebab kemiskinan di Indonesia masih besarnya penduduk miskin di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan, penduduk miskin di daerah pedesaan diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin terutama di daerah pedesaan. Sementara itu masyarakat miskin banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro masih

mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktivitasnya.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin Pedesaan Dan Perkotaan
September 2020-September 2021

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2020	12,04	7,88
Maret 2021	12,18	7,89
September 2021	11,86	7,60
Perdesaan		
September 2020	15,51	13,20
Maret 2021	15,37	13,10
September 2021	14,64	12,53
Total		
September 2020	27,55	10,19
Maret 2021	27,54	10,14
September 2021	26,50	9,71

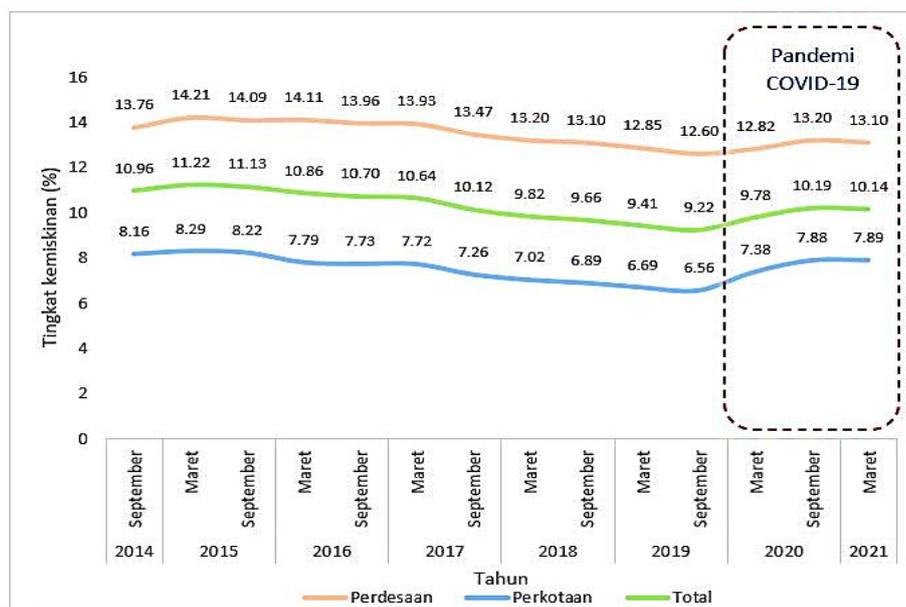
Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 1,04 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,05 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021–September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,32 juta orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,73 juta orang. Persentase kemiskinan

di perkotaan turun dari 7,89 persen menjadi 7,60 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,53 persen.

Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun berjuang untuk mengatasi kemiskinan, menemukan berbagai cara pengentasan kemiskinan antara lain dengan BOS untuk pendidikan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Raskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM), Pemberdayaan UMKM, Kenaikan Gaji buruh, Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Bantuan Kartu Prakerja.



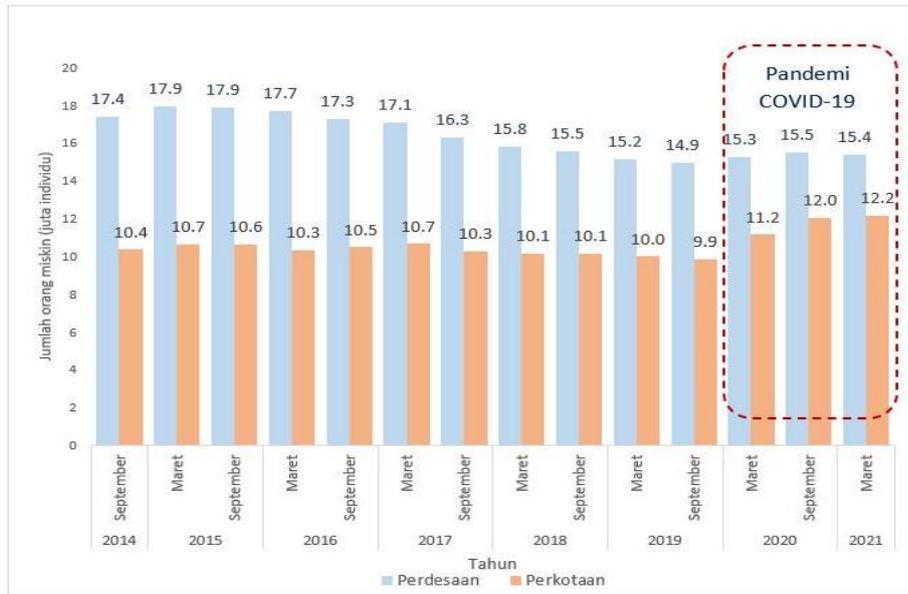
Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2014-2021(%Populasi)

Perekonomian Indonesia telah memasuki krisis sejak triwulan kedua 2020. Dua hal menjadi alasan utama di balik krisis ini. Pertama, semakin banyak populasi yang terinfeksi COVID-19 (termasuk populasi produktif). Situasi ini

mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 ini. Kedua, pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat perekonomian tidak beroperasi 100% dari kapasitas optimalnya karena sebagian usaha harus ditutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan. Terkait krisis ekonomi, salah satu indikatornya adalah angka pertumbuhan ekonomi. BPS merilis laporan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 0,74% pada triwulan pertama 2021. Kondisi perekonomian pada triwulan pertama 2021 tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi meski menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada di bawah laju kondisi normal sebelum terjadi pandemi. Pada saat yang sama, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita (ukuran kesejahteraan rata-rata nasional) juga turun sebesar 3,15% pada 2020. Artinya, terjadi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia selama 2020 dibandingkan 2019.

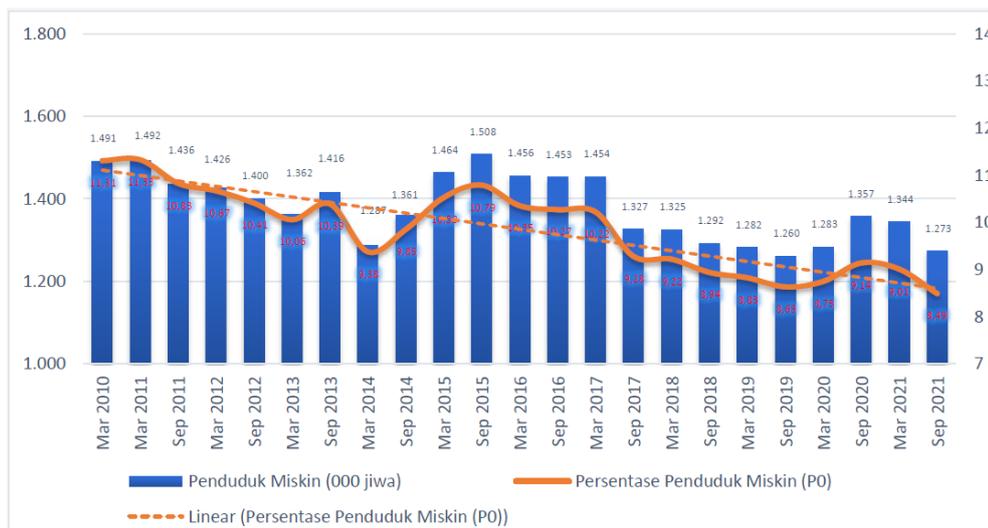
BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019.



Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Gambar 1.2 jumlah penduduk miskin di Indonesia 2014-2021 (juta orang)

Jika dilihat berdasarkan jumlah orang miskin, sejak September 2019 (kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia), jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan perdesaan sebesar 120 ribu orang



ditunjukkan pada gambar 1.2.

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Gambar 1.3 Grafik Perkembangan kemiskinan di Sumatera Utara Maret 2017 - September 2021

Secara umum, pada periode September 2011 – September 2021 tingkat kemiskinan di Sumatera Utara terjadi fluktuasi turun naik dalam jumlah maupun persentase. Ada dua (2) fase turun naik yang terjadi, fase pertama dari September 2011 cenderung menurun hingga Maret 2014 dan kemudian meningkat hingga September 2015. Fase kedua terjadi penurunan pada Maret 2016 hingga September 2019, lalu mulai meningkat hingga September 2020. Kenaikan tingkat kemiskinan pada fase pertama, khususnya pada Maret 2015 hingga Maret 2017 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada fase kedua, periode Maret 2020 hingga September 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Kendati demikian, periode Maret 2021 mulai menunjukkan penurunan hingga periode September 2021.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.273,07 ribu jiwa atau sebesar 8,49 persen terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.356,72 ribu jiwa atau sebesar 9,14 persen pada September 2020, dimana terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 83,65 ribu jiwa pada periode September 2020 - September 2021, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,65 poin.

Kabupaten Langkat, adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Jumlah penduduknya sekitar 1.041.775 jiwa, luas wilayah Kabupaten Langkat sekitar 1.041.775 km² berjarak 40 km dari kota Medan, Sumatra Utara.

Secara garis besar, pada periode 2010-2020 tren persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Langkat cenderung berfluktuasi. Dalam periode 10 tahun, persentase penduduk miskin menurun 1,12 poin dari 10,85 di tahun 2010 menjadi 9,73 di tahun 2020. Kenaikan tertinggi penduduk miskin terjadi pada tahun 2014 ke tahun 2015, yaitu sebesar 1,31 poin. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017 ke 2018, yaitu sebesar 0,95 poin. Meskipun perkembangan penduduk miskin terlihat berfluktuasi, namun dalam empat tahun terakhir (tahun 2017-2020), baik persentase maupun jumlah penduduk miskin terlihat terus mengalami penurunan.



Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Gambar 1.4 Grafik Perkembangan tingkat kemiskinan Di Kabupaten Langkat Maret 2010- September 2020

Pada gambar diatas, terlihat bahwa pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Langkat sebanyak 103,08 ribu jiwa, berkurang 1.210 jiwa di tahun 2020 menjadi 101,87 jiwa. Begitu pula dengan persentase penduduk miskin mengalami penurunan 0,18 persen menjadi 9,73 persen di tahun 2020. Penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan terdapat penduduk yang pada tahun 2019 termasuk dalam penduduk miskin namun di tahun 2020 tidak lagi dikategorikan sebagai penduduk miskin. Hal ini dapat dikarenakan keadaan ekonomi penduduk tersebut sedikit membaik sehingga terangkat ke atas garis kemiskinan. Namun demikian, kelompok penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kelompok yang rentan dapat mengubah komposisi penduduk miskin karena rawan untuk kembali lagi ke dalam kelompok penduduk miskin jika perekonomiannya sedikit terguncang.

Pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas-fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengangguran kemiskinan.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam IPM terdapat 3 indikator komposit yang digunakan untuk mengatur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu : lama hidup, yang

diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup, yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga IPM



meningkat.

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2021

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2010–2021 IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen per tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,29 pada tahun 2021. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Indonesia sudah kembali

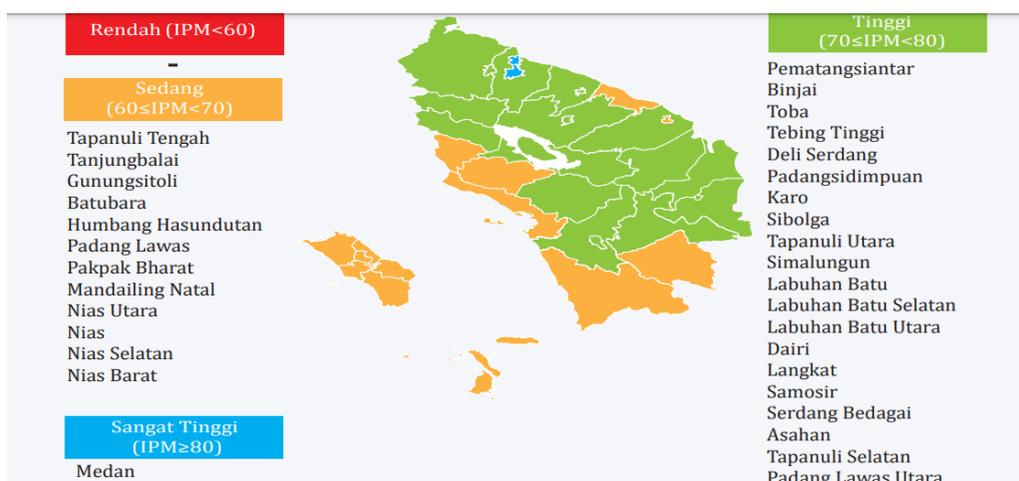
mambaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator riil perkapita (yang disesuaikan).

Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 1,30 persen. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,08 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang, menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditunjukkan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber

daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas (Rapanna & Fajriah, 2018)

Salah satu faktor yang menentukan pembangunan nasional adalah indeks kualitas hidup (IKH). IKH digunakan dalam pengukuran kesejahteraan dan kamakmuran masyarakat. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada Angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, Angka kematian bayi, Angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat



menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Gambar 1.6 Pencapaian pembangunan Manusia Di Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2021

Seiring dengan meningkatnya IPM Sumatera Utara, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antarkabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Perubahan status terjadi

pada Kabupaten Padang Lawas Utara, yang pada 2021 mencapai status “tinggi”. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Nias Barat (61,99), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Medan (81,21) yang sekaligus menjadikan Kota Medan sebagai satu-satunya kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) pada 2021 adalah sebanyak 20, dengan status “sedang” (capaian $60 \leq IPM < 70$) adalah 12, dan dengan status “rendah” ($IPM < 60$) sudah tidak ada lagi. Sejak 2018, tidak ada lagi kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia “rendah”.

Millenium Development Goals (MDGs) hadir yang telah disetujui oleh 189 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2000. MDGs merupakan paling kuat yang menunjukkan komitmen internasional untuk kemiskinan global. Ada delapan tujuan yang telah disepakati PBB yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
3. Mendorong kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Menurunkan angka kematian anak.
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Tujuan-tujuan tersebut dicanangkan secara khusus untuk dicapai pada tahun 2015.

Pada tanggal 25 september 2015, PBB melakukan perubahan dari MDGs menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia.

SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan.
2. Tanpa Kelaparan.
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
4. Pendidikan Berkualitas.
5. Kesetaraan Gender.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak.
7. Energi Bersih dan Terjangkau.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur.
10. Berkurangnya Kesenjangan.
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.
13. Penanganan Perubahan Iklim.

14. Ekosistem Lautan.
15. Ekosistem Daratan.
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaan. SDGs merupakan penyempurnaan dari MGDs yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Sebagai sebuah agenda lanjutan dari MDGs, SDGs memiliki beberapa perbedaan dibandingkan MDGs. SDGs mengakomodasi masalah pembangunan secara lebih komprehensif, baik kualitatif dengan mengakomodir isu pembangunan yang belum ada dalam MDGs, maupun secara kuantitatif, dengan target penyelesaian secara tuntas setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Begitu juga dengan proses perumusannya, SDGs lebih partisipatif dan tidak eksklusif birokratis, serta melibatkan kepentingan non-pemerintah, seperti lembaga swadaya pemerintah, universitas/akademi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok kepentingan lainnya.

SDGs berpedoman pada 5 prinsip dasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dikenal dengan 5P, yaitu :

1. People (manusia)
2. Planet (bumi)
3. Prosperity (kesejahteraan)
4. Peace (perdamaian)
5. Partnership (kemitraan)

Konsep pengembangan SDGs berpijak pada tiga pilar utama, yaitu: pertama, pembangunan manusia (*Human Development*) seperti pendidikan dan kesehatan, Kedua, pembangunan lingkungan sosial ekonomi (*Social Economic Development*) seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi, ketiga, pembangunan lingkungan (*Environmental Development*) seperti ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Artinya SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan.

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Tujuan Dan Sasaran SDGs Desa :

1. Desa tanpa kemiskinan.
2. Desa tanpa kelaparan.
3. Desa sehat dan sejahtera.
4. Pendidikan desa berkualitas.
5. Desa berkeadilan gender.
6. Desa layak air bersih dan sanitasi.
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan.
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa.
9. Inovasi dan infrastruktur desa.
10. Desa tanpa kesenjangan.
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan.
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa.
14. Ekosistem laut desa.
15. Ekosistem daratan desa.
16. Desa damai dan berkeadilan.
17. Kemitraan untuk pembangunan desa.
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Bagi desa-desa di Indonesia, pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa benar-benar dibutuhkan. Bahkan SDGs Desa menjadi acuan utama pembangunan jangka menengah desa seluruh Indonesia. SDGs teruji memudahkan pengukuran pembangunan. Ukurannya sendiri menyeluruh terhadap aspek-aspek kehidupan warga dan lingkungannya. Karena itu, pelokalan SDGs Desa membuat arah pembangunan desa menjadi jelas dan terinci dalam tujuan-tujuan yang holistik.

Indonesia merupakan Negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat banyak, khususnya di bidang kemaritiman, Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 54.716 km atau setara dengan 1.3 kali keliling bumi dan luas perairannya terdiri dari laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari keluasan wilayah Negara Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki wilayah kawasan pesisir yang sangat luas. Kawasan pesisir adalah kawasan yang berada di sekitar pantai ke arah laut dan ke arah darat. Ekosistem kawasan pesisir mencakup pantai, muara sungai (*estuary*), terumbu karang, hutan mangrove, hutan rawa pantai, dan perairan dekat pantai (*inshore*).

Kawasan pesisir merupakan daerah pertemuan antara ekosistem laut dan darat yang merupakan habitat bagi berbagai makhluk hidup dan juga mengandung berbagai sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pesisir adalah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang

dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Karena banyaknya sumber daya yang terkandung didalamnya, menjadikan kawasan pesisir sebagai konsentrasi pemukiman penduduk beserta dengan segenap kiprah pembangunannya. Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa.

Kehidupan masyarakat desa pesisir memiliki perbedaan dengan aspek kehidupan pada masyarakat agraris (penduduk yang tinggal di daerah pedesaan pada umumnya). Hal ini disebabkan factor lingkungan alam, karena masyarakat pesisir lebih terkait dengan laut yang dominan, sedangkan masyarakat agraris terkait dengan lingkungan alam yang berupa sawah, tegalan atau lading. Dengan kondisi yang berbeda ini, memungkinkan mereka mempunyai kultur dan system pengetahuan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai pada umumnya bergantung dari sumber daya laut atau pantai, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain sebagai nelayan, sebagian penduduknya juga membudidayakan lahan mereka sebagai tambak ikan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya laut mempunyai peran yang penting bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Kehidupan mereka sungguh memprihatinkan karena sebagai nelayan tradisional yang tergolong ke dalam kelompok masyarakat miskin mereka seringkali dijadikan objek eksploitatif oleh para pemilik modal. Harga ikan sebagai sumber pendapatannya dikendalikan oleh para pemilik modal atau

para pedagang/tengkulak, sehingga distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan baik secara alamiah, struktural, maupun kultural. misalnya Secara alamiah laut memang sulit diprediksi. Gelombang tinggi, angin kencang atau badai, serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit.

Ada sekitar 60 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan penyumbang sekitar 22% dari pendapatan bruto nasional. Tak bisa dipungkiri ditengah potensi besar lautan justru kemiskinan penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan dan wilayah pesisir, sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan.

Dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia, dari 273 juta lebih penduduk di Indonesia penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan hanya 2.15 juta dan terus turun dari tahun ke tahun. Jumlah nelayan Indonesia dapat dikatakan hanya sedikit apabila dibandingkan dengan luas laut yang dimiliki Indonesia. Bahkan, mayoritas nelayan tersebut berada dalam ambang batas garis kemiskinan. Potensi wilayah pesisir yang pemanfaatan paling besar an menjadi tulang punggung wilayah pesisir adalah perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya.

Di sisi lain nelayan mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam modernisasi kehidupan manusia. Nelayan termasuk *Agent Of Development* yang paling reaktif terhadap lingkungan. Sifatnya yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang hidup dipedalaman, menjadi stimulator untuk menerima perkembangan peradaban yang lebih modern (Sudrajad, 2008:2). Namun dalam perkembangannya, justru nelayan belum

menunjukkan kemajuan yang berarti sebagaimana kelompok masyarakat yang lain. Keberadaan mereka sebagai *Agent Of Development* ternyata tidak ditunjukkan secara positif dengan kehidupan ekonominya. Salah satu golongan nelayan yang menerima efek langsung oleh krisis tersebut adalah nelayan tradisional boleh dikatakan adalah kelompok masyarakat pesisir yang paling menderita dan merupakan korban pertama dari perubahan situasi social ekonomi yang datangnya tiba-tiba dan berkepanjangan (Sudarso,2008:1). Sedangkan bila dilihat dari tempat tinggalnya, pada umumnya nelayan tradisional berada dalam lingkungan sumberdaya laut yang kaya raya, namun mereka miskin. Sudjatmoko (1995:47) menyatakan kemiskinan yang terjadi pada nelayan tradisional adalah kemiskinan structural.

Dahuri Et Al (2001) potensi pembangunan yang terdapat di wiliayah pesisir secara garis besar terdiri dari tiga kelompok :

1. Sumber daya dapat pulih (*renewable resources*)

Sumber daya pulih adalah sumber daya yang dapat dikembangkan atau dilestarikan, seperti hutan mangrove(bakau), terumbu karang, rumput laut,dan sumber daya perikanan laut.

2. Sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*)

Sumber daya yang tidak dapat pulih terdiri dari seluruh mineral dan geologi, termasuk ke dalamnya antara lain minyak gas, batub bara, emas, timah, nikel, biji besi, granit, tanah liat, pasir, kaolin, kerikil, dan batu pondasi.

3. Jasa-jasa lingkungan (*environmental service*)

Jasa-jasa lingkungan meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan lindung, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi fisiologis lainnya.

Potensi kelautan dan perikanan Sumatera Utara terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dimana potensi perikanan tangkap terdiri dari potensi selat Malaka sebesar 276.030 ton/tahun dan potensi di Samudera Hindia sebesar 1.076.960 ton/tahun. Sedangkan produksi perikanan budidaya terdiri dari budidaya tambak 20.000 Ha dan budidaya laut 81.372,84 Ha dan perairan umum 155.797 Ha, kawasan pesisir Sumatera Utara mempunyai panjang pantai 1300 km yang terdiri dari panjang pantai timur 545 km, panjang pantai barat 375 km dan kepulauan Nias dan pulau-pulau baru sepanjang 350 km.

Sedangkan wilayah pembangunan kelautan dan perikanan di provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan yang terdiri dari :

1. Wilayah pantai barat Sumatera Utara

Terdiri dari 12 kabupaten/kota yang berada di wilayah pantai barat yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dimana

potensi pengembangan pada wilayah ini adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan, Budidaya laut dan Budidaya tambak.

2. Wilayah dataran tinggi Sumatera Utara

Kabupaten/kota yang termasuk pada wilayah dataran tinggi Sumatera Utara adalah wilayah yang berada di wilayah tengah provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 10 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan potensi pengembangan pada wilayah ini terdiri dari penangkapan ikan di perairan umum, pengolahan ikan dan budidaya air tawar.

3. Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara

Terdapat 11 kabupaten/kota yang termasuk pada wilayah pantai timur Sumatera Utara yang terdiri dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kota Tanjung Balai. Dimana potensi pengembangan di wilayah ini terdiri dari penangkapan ikan, budidaya laut, budidaya tawar, budidaya tambak, dan budidaya perairan umum.

Salah satu kabupaten di wilayah pantai timur Sumatera Utara yang memiliki potensi yang besar adalah Kabupaten Langkat. Secara administratif saat ini kabupaten Langkat memiliki 23 kecamatan dan 277 desa/kelurahan dengan luas wilayah 6.263,29 km². Akan tetapi dengan potensi sumber daya

alam di Kabupaten Langkat Kemiskinan di Kabupaten masih didominasi kemiskinan di daerah pedesaan, salah satunya di Kecamatan Brandan Barat. Kecamatan Brandan Barat merupakan satu dari 23 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 23.600 jiwa. Kecamatan Brandan Barat juga memiliki 7 desa dengan luas wilayah 11.070 Ha, Dengan 70,4% lahan pertanian dan 29,6% lahan non pertanian. Kecamatan Brandan Barat juga memiliki 2 Desa pesisir yang berada di sekitar sungai babalan yaitu Desa Perlis dan Desa klantan. Desa tersebut memiliki mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Desa nelayan yang mayoritas penduduknya suku Melayu memiliki keunikan.

Dengan luas wilayah dan panjang pantai tersebut tentunya wilayah pesisir kecamatan berandan barat menyimpan potensi yang sangat besar . beberapa potensi yang dimiliki antara lain :

1. Memiliki sumberdaya perikanan tangkap dan sumber daya perikanan budidaya yang cukup tinggi.
2. Memiliki pantai yang potensial dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari.
3. Memiliki hutan bakau yang cukup luas;

Sebagaimana daerah pesisir lainnya, sektor perikanan juga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian kabupaten Langkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah pesisir sebagai penghasil utama perikanan mempunyai peran yang sangat besar dalam perekonomian dan tentunya masih memiliki peluang untuk pengembangan dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan point yang tertera pada SDGs.

Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki potensi yang sangat besar. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi sampai saat ini adalah kawasan pesisir merupakan kawasan yang memiliki desa-desa dengan tingkat kemiskinan yang juga sangat tinggi. Masyarakat yang bermukim di desa-desa di wilayah pesisir banyak yang kondisi kehidupannya sangat memprihatinkan, terampas hak-haknya sehingga menjadi miskin. Kemiskinan di daerah pedesaan menjadi penyebab dan akibat terjadinya kerusakan sumberdaya alam pedesaan yang berdampak pada masyarakat luas (Rustiadi.,et al.,2001).

Kemiskinan dan tekanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga nelayan di desa pesisir berakar dari faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor alamiah dan non alamiah.

1. Faktor alamiah

Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim penangkapan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa.

2. Faktor non alamiah

Faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya jaringan pemasaran dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang telah berlangsung.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di kawasan desa pesisir sangatlah perlu untuk ditangani dengan demikian peneliti sangat tertarik untuk meneliti apakah penerapan SDGs dapat berpengaruh dalam penanganan kemiskinan di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Untuk itu penelitian ini berjudul **“Implementasi *Sustainable Development Goals* SDGs Terhadap Penanganan Kemiskinan Penduduk Di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kemiskinan di wilayah pesisir masih belum teratasi dan belum mendapat perhatian khusus.
2. Kemiskinan di perdesaan lebih sulit ditangani daripada kemiskinan di perkotaan.
3. Implementasi SDGs merupakan salah satu cara mengatasi kemiskinan di wilayah pesisir.
4. Kemiskinan di wilayah pesisir pada dasarnya terjadi akibat tekanan sosial dan keterbatasan akses yang dimiliki.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan SDGs dalam penanganan kemiskinan

masyarakat wilayah pesisir yang dialami penduduk di wilayah pesisir di Kecamatan Brandan Barat yaitu Desa Perlis, Desa Klantan, Dan Desa Lubuk Kertang.

1.4 Rumusan masalah

1. Bagaimana perkembangan kemiskinan Di Kabupaten Langkat sebelum dan setelah Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT – Dana Desa) pemerintah bagi penduduk miskin di Kecamatan Brandan Barat?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Brandan Barat?

1.5 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang Head Count Index, (persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan), Poverty Gap Index (Indeks Kedalaman Kemiskinan), Poverty Severity Index

(Indeks Keparahan Kemiskinan) di Kabupaten Langkat sebelum Dan setelah Pandemi Covid-19.

2. Melakukan evaluasi rumah tangga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT – Dana Desa) pemerintah di Kecamatan Brandan Barat.
3. Melakukan analisa faktor untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Brandan Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Bagi peneliti, sebagai bahan studi atau tambahan referensi dan informasi awal untuk penelitian lebih lanjut tentang berbagai penanganan kemiskinan dan pengembangan di wilayah pesisir di Kecamatan Brandan Barat.
- b. Bagi mahasiswa, melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara alamiah, teoritis, dan sistematis.

2. Manfaat Non-Akademik

- a. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah di Kabupaten Langkat dalam perencanaan pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Brandan Barat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah dalam memutuskan kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (*gross national income*- GNI) per kapita “riil” (pertumbuhan moneter dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan-seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro & Smith, 2017).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2017).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap- sikap masyarakat, dan institusi – institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2017).

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta (Jhingan, 2010).

2.1.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into*

the Nature and Cause of the Wealth of Nations yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur-tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional.

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: (1) meningkatnya keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal.

Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan

mepertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal.

“Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Buku ini diterbitkan 1917. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut

ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi.

Asumsi teori Ricardo Teori-teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa:

- 1) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri;
- 2) “*law of diminishing return*” berlaku bagi tanah;
- 3) Persediaan tanah adalah tetap;
- 4) Permintaan akan gandum benar-benar inelastis;
- 5) Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel;
- 6) Keadaan pengetahuan teknik adalah tertentu (*given*);
- 7) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal;
- 8) Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap
- 9) permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja;
- 10) Terdapat persaingan yang sempurna;
- 11) Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan;

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan.

Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, “Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh

secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan.” Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah. (Jhingan, 2010) .

2.1.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya.

Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*). (Todaro & Smith, 2017)

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan structural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi

struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2017).

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualism ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2017).

2.1.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Fei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pertaniannya berhenti. Kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Bidang- bidang nonpertanian memang ada, tetapi begitu banyak mempergunakan modal. Disitu juga ada sektor industri yang aktif dan

dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian, yang sumbangannya terhadap *output* adalah nol atau dapat diabaikan, ke sektor industri di mana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian.

Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Fei dan Ranis membuat asumsi berikut:

- a. Ada ekonomi dua-muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang mandeg, dan sektor industri yang aktif.
- b. *Output* sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh aja.
- c. Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi).
- d. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap.
- e. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel.
- f. Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol.
Jika penduduk melampaui jumlah di mana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi keluaran (*output*) pertanian.
- g. *Output* sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh aja.
- h. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen.
- i. Upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian.
- j. Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk produk pertanian.

Berdasarkan asumsi ini, Fei dan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus-buruh menjadi tiga tahap. Pada *tahap pertama*, para penganggur tersamar yang tidak menambah *output* pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Pada *tahap kedua*, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusional yang mereka peroleh. Ini mengawali *tahap ketiga*, yang menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Di dalam tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian berangkat menjadi komersial.

2.1.2 Kemiskinan dan Ketimpangan

2.1.2.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum. Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di dunia. Negara miskin masih dihadapkan antara masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya. (Todaro & Smith ,2017).

2.1.2.2 Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan memiliki jenis-jenis yang beragam dilihat dari suut pandang yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut pandang pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang dikategorikan termasuk kedalam kemiskinan absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang tergolong miskin sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada dibawah garis kemampuan masyarakat sekitarnya.

Dilihat dari sisi penyebabnya kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

1. kemiskinan Kultural

kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

2. kemiskinan struktural

kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan juga disebabkan oleh faktor-faktor rekayasa manusia.

2.1.2.3 Penyebab Kemiskinan

(Todaro & Smith 2017) terdapat empat penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu:

1. Terlalu menggantungkan diri pada sektor pertanian dengan produksi yang masih tradisional.
2. Kepemilikan sumber daya yang tidak sama sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses terhadap modal.
4. Perbedaan kualitas sumber daya manusia.

Penyebab kemiskinan di desa dan di kota. Kemiskinan di desa disebabkan oleh faktor-faktor, diantaranya:

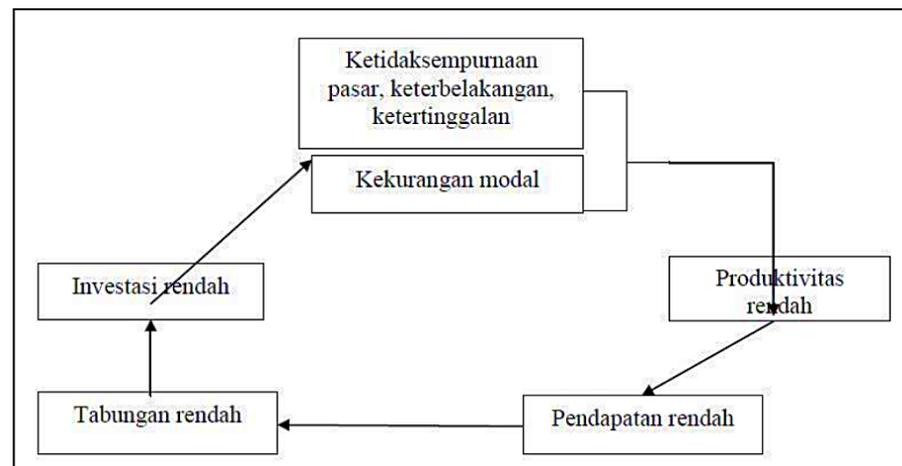
- a. Ketidakberdayaan. Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan, dan tingginya biaya pendidikan.
- b. Keterkucilan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin.
- c. Kemiskinan materi. Kondisi ini diakibatkan kurangnya modal dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah.

- d. Kerentanan, sulitnya mendapat pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam, membuat mereka menjadi rentan dan miskin.
- e. Sikap. Sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.

Penyebab kemiskinan di kota pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang sama dengan kemiskinan yang terjadi di desa. Perbedaannya terletak pada penyebab dari faktor-faktor tersebut. Misalnya faktor ketidakberdayaan di kota cenderung disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, dan tingginya biaya hidup.

Kuncoro (2006) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*).

(Kuncoro, 2006): Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.



Gambar 2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Sumber: *Kuncoro (2006: 120)*

2.1.2.4 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu:

1. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Disamping itu, untuk mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan

patokan 2.100 kalori per orang per hari. Sedangkan untuk kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa lainnya. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

2.1.2.5 Kriteria Kemiskinan

Pengertian kemiskinan antara satu Negara dengan Negara lain juga berbeda. Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. Kriteria statistik BPS tersebut adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun

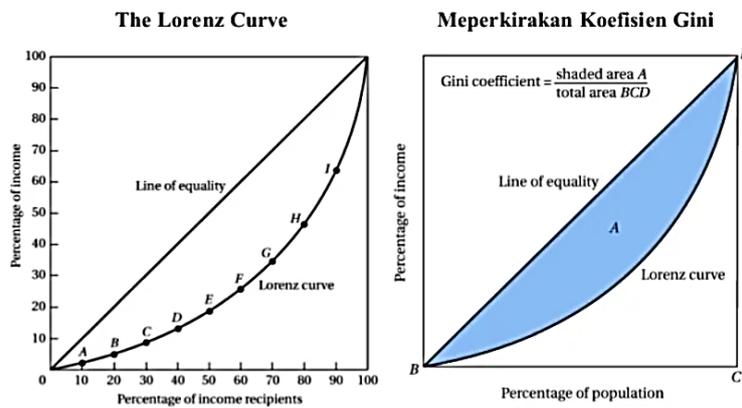
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.1.2.6 Mengukur Ketimpangan dan Kemiskinan

Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dapat dikelompokkan sebagai ketimpangan rendah, sedang atau tinggi. Pengelompokan ini sesuai dengan ukuran ketimpangan yang digunakan. (Todaro & Smith :2017), nilai Gini Ratio pada negara-negara yang ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, nilainya antara 0,20 hingga 0,35. Gini Ratio bisa dihitung dengan menggunakan Kurva Lorenz. Gini Ratio dirumuskan sebagai rasio antara luas bidang yang terletak antara Kurva Lorenz dan garis diagonal dengan luas separuh segi empat dimana Kurva Lorenz berada.

Kurva Lorenz adalah kurva yang bisa dijadikan patokan dalam menentukan merata atau tidaknya distribusi pendapatan. Unsur dalam kurva lorenz : Sumbu horizontal (sumbu x/ mendatar) mendefenisikan persentase kumulatif penduduk. Sementara sumbu vertikal (sumbu y/ tegak) mewakili

persentase pendapatan yang diterima penduduk. Dari titik koordinat yang di dapat bisa ditarik sebuah garis dalam kurva tersebut disebut garis pemerataan.



Gambar 2.2. Kurva Lorenz

Sumber: Todaro & Smith (2017)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian

1	Melfi Novita Sari Hutaaruk, 2017	Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Pesisir Di Kota Sibolga	Berdasarkan hasil analisis dengan tabel matriks diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat pesisir di Kota Sibolga tergolong miskin antara lain tingkat pendidikan, jumlah beban tanggungan, status kepemilikan rumah, jenis lantai rumah, jenis dinding bangunan.
2	Linda Rajak, 2018	KEMISKINAN NELAYAN PESISIR (Studi Penelitian Pada Nelayan Tradisional di Dusun Tamboo Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo)	Berdasarkan hasil penelitian faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan di Dusun Tamboo di pengaruhi oleh: 1) Pola pikir masyarakat (<i>Mindset</i>) ; 2) pekerjaan alternatif, 3) kepemilikan modal. Kata kunci : Masyarakat Nelayan, Faktor Kemiskinan, Hubungan Kerja antar Nelayan.
3	Muhammad Iqbal Latief ¹ , Hasbil, Sultan , Arsyad Genda, Pasmudir.	intervensi SDGs Terhadap Penanganan Kemiskinan Nelayan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar	Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa, penerapan SDGs sebagai strategi intervensi penanganan kemiskinan masih belum efektif, karena; (1) Masih banyak nelayan yang belum paham tentang program SDGs dalam mengembangkan ekonominya; (2) Program SDGs masih sangat terbatas implementasinya karena terkendala kebijakan. Sebagai saran, perlu dilakukan sosialisasi yang massif dan intensif terhadap kebijakan, program dan pelaksanaan SDGs di masyarakat nelayan. Selain itu, perlu dibangun kelembagaan yang efektif menangani pelaksanaan SDGs pada masyarakat nelayan di kota

			Makassar.
--	--	--	-----------

2.3. Regulasi / Kebijakan Pemerintah

2.3.1 *The Sustainable Development Goals (SDGs)*

The Sustainable Development Goals (SDGs) berlaku sejak 1 Januari 2016 sampai akhir tahun 2030 dengan 169 target, sebagai kelanjutan dari kesepakatan *Millennium Development Goals (MDGs)* yang telah berakhir periodenya pada tahun 2015.

Hasil penelitian pencapaian MDGs menemukan bahwa Perkembangan beberapa indikator pembangunan di Indonesia menunjukkan belum seimbangya pembangunan, sektor ekonomi, sosial lebih dominan dan kurang prioritas pada lingkungan. Oleh karena itu era SDGs diproyeksikan lebih memberikan keseimbangan, supaya pembangunan peningkatan kualitas kesejahteraan bangsa tidak merusak hak generasi yang akan datang atas keselamatan bumi .

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali, SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169

indikator. Peran pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat lokal berandil besar untuk mensukseskan tercapainya tujuan SDGs. Peran strategis tersebut dikarenakan pemerintah kota dan kabupaten (a) berada lebih dekat dengan warganya; (b) memiliki wewenang dan dana; (c) dapat melakukan berbagai inovasi; serta (d) ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Pemerintah daerah diamanatkan oleh pemerintah pusat menyukseskan pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensinya, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Undang-undang Republik Indonesia no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa:

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari (i) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun 20 tahun, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 1 tahun, (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun.

Prioritas pembangunan nasional wajib diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) harus diprioritaskan dalam RPJMD.

Ketentuan yang di atur dalam kedua Undang-undang tersebut menjadi kerangka kerja bagi pencapaian target SDGs melalui program dan kegiatan pembangunan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Salah satu tujuan dalam SDGs adalah "mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun (*End poverty in all its forms everywhere*).". Tujuan pertama ini memiliki

7 target, dimana cakupannya memuat elemen dari tujuan SDGs lainnya. Target dari tujuan pertama SDGs yaitu:

1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang di mana pun, di mana ukuran yang digunakan sekarang adalah mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$ 1,25 perhari.
2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya separuh proporsi dari laki-laki, perempuan dan anak-anak segala umur yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensi menurut definisi nasional. b. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level dan pada tahun 2030 sudah mencapai cakupan yang cukup substansial terhadap yang miskin dan rentan.
3. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi, juga terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial, termasuk keuangan mikro.
4. Pada tahun 2030, membangun daya tahan mereka yang miskin dan yang berada dalam situasi rentan dan mengurangi situasi tanpa perlindungan dan kerentanan terhadap kejadian-kejadian ekstrim yang berhubungan dengan perubahan iklim, juga kejutan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya.

Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas, dalam rangka

menyediakan alat-alat yang cukup dan mudah diprediksi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya

Menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitive, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan.

2.3.2 Pengurangan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4%.

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan

penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Sesuai data dari Kementerian Keuangan, anggaran terkait kemiskinan di tahun anggaran 2021 mencapai Rp.526 triliun. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021, agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Pada tahun 2021 ini upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 Provinsi dan diprioritaskan pada 35 Kabupaten yang telah mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional yang berjumlah 10,4 juta jiwa, yang berarti pada tahun 2021 ini akan menasar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga. Ketujuh provinsi tersebut adalah

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

2.4 Tahapan Penelitian

Penyebab kemiskinan yang terjadi di masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Brandan Barat adalah karena penggunaan sarana produksi yang masih sederhana, menyebabkan jumlah hasil produksi yang diperoleh masih sangat rendah bila dibandingkan dengan orang yang menggunakan sarana yang cukup memadai. Selain itu, tingginya jumlah tanggungan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta rendahnya keterampilan yang rendah menyebabkan tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Brandan rendah sehingga senantiasa dililit oleh lingkaran kemiskinan.

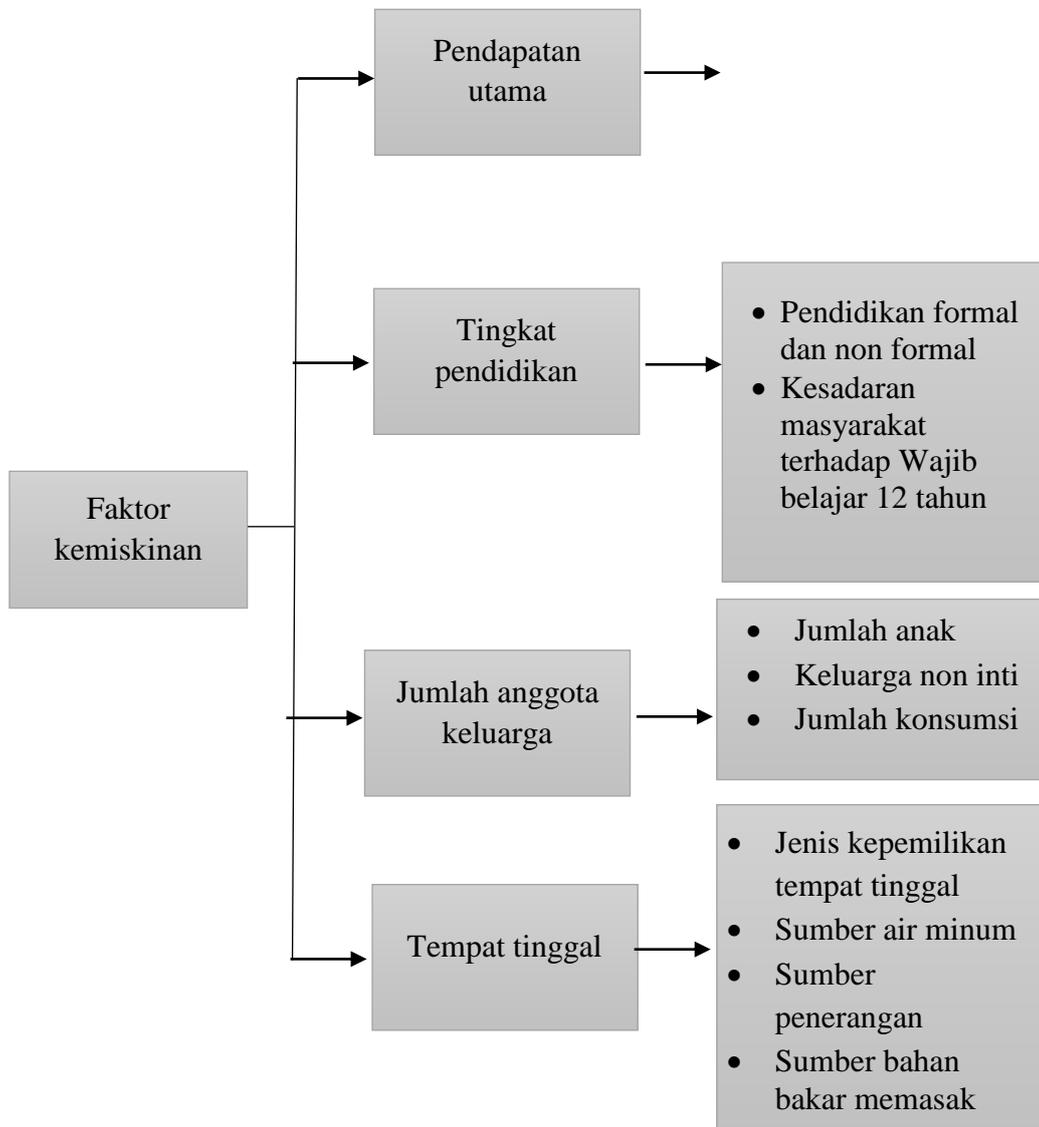
2.4.1 Kerangka Analisis Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Analisis Penelitian

2.4.2 Kerangka Konseptual





Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesa

Pendapatan Utama, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, tempat tinggal berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk penjelasan atau keterangan. Data yang disajikan adalah data *primer*, dimana data *primer* diperoleh berdasarkan hasil langsung di lapangan.

3.2 Definisi operasional

Tabel 3.1

Definisi Operasional

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sumber data
Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	Garis Kemiskinan Penduduk KabupatenLangkat	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id
Pendapatan	Seluruh jumlah penghasilan yang diperoleh suatu keluarga selama satu bulan	a. Pendapatan Pokok b. Pendapatan Tambahan c. Distribusi Pendapatan	Reponden
Tingkat Pendidikan	Jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh kepala keluarga dan anggota keluarga	a. Pendidikan Formal Dan Non Formal b. Kesadaran Masyarakat Terhadap Wajib Belajar 12 Tahun	Reponden
Jumlah Anggota	Banyaknya anggota keluarga	a. Jumlah Anak b. Keluarga Non Inti	Responden

Keluarga	yang masih dibiayai (anggota keluarga yang belum berpenghasilan)	c. Jumlah Konsumsi	
Tempat Tinggal	Kelayakan tempat tinggal yang digunakan seluruh anggota keluarga	a. Jenis Kepemilikan Tempat Tinggal b. Sumber Air Minum c. Sumber Penerangan d. Sumber Bahan Bakar Memasak	Responden

3.3 Tempat dan waktu penelitian

3.3.1 Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan. Brandan Barat Kabupaten. Langkat.

3.3.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 2 bulan dimulai dari Juli sampai dengan Agustus 2022.

3.4 Jenis dan Sumber data

3.4.1 Jenis data

Data yang dibutuhkan menurut sifatnya adalah berupa data kualitatif (berupa penjelasan dan keterangan). Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Pada umumnya data kualitatif bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, maupun posisi data yang tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat (Kuncoro,2013).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang didapat dengan melakukan penelitian langsung berupa menyebarkan kuisisioner, wawancara langsung berupa kuisisioner wawancara langsung kepada para pengguna (Kuncoro,2013) .

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Kuncoro (2013) bahwa populasi adalah Wilayah Generalisasi terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 340 rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di wilayah pesisir Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

3.5.2 Sampel

Menurut Kuncoro (2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Probability Sampling* yaitu, teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan teknik *probability sampling*. Bahwa setiap anggota populasi ini mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Data primer diperoleh menggunakan kuisisioner (angket)

yaitu suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau biang yang akan diteliti, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan , serta informasi yang dibutuhkan secara serentak (Kuncoro,2013).

Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat pendamping dalam pengumpulan data. Daftar pertanyaan dibuat semi terbuka yang memberi pilihan jawaban pada responden dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh peneliti.

3.7 Teknik Analisis Penelitian

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder.data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis. Keseluruhan data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis menggunakan teknik seperti berikut :

3.7.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

3.7.2 Metode Analisa Faktor

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). PLS merupakan model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan berdasarkan variance atau component-based structural equation modeling. Menurut Ghozali & Latan (2015), tujuan PLS-SEM adalah untuk mengembangkan teori atau membangun teori (orientasi prediksi). PLS digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (prediction). PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data arus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sample kecil (Ghozali, 2011). Penelitian ini memiliki model yang kompleks serta jumlah sampel yang terbatas, sehingga dalam analisis data menggunakan software SmartPLS. SmartPLS menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dengan dilakukannya bootstrapping maka SmartPLS tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel, sehingga dapat diterapkan untuk penelitian dengan jumlah sampel kecil. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (measurement model) atau outer model dan model struktural (structural model) atau inner model.

1. Uji Statistik Deskriptif Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2016).

2. Uji Model Pengukuran atau Outer Model Model pengukuran atau outer model menunjukkan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. valuasi model pengukuran melalui analisis faktor konfirmatori adalah dengan menggunakan pendekatan MTMM (MultiTrait-MultiMethod) dengan menguji validity convergent dan discriminant. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (Ghozali & Latan, 2015).

a. Convergent Validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara item score/indikator dengan score konstruksinya. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 2015).

b. Discriminant Validity

Discriminant validity indikator dapat dilihat pada cross loading antara indikator dengan konstruksinya. Apabila korelasi konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah dengan membandingkan akar

kuadrat dari average variance extracted (\sqrt{AVE}) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dengan model. Model dikatakan mempunyai discriminant validity yang cukup baik jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya (Fornell & Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2011). Dalam Ghozali & Latan (2015) menjelaskan uji lainnya untuk menilai validitas dari konstruk dengan melihat nilai AVE. Model dikatakan baik apabila AVE masing-masing konstruk nilainya lebih besar dari 0,50.

c. Reliability

Selain uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program SmartPLS 3.0, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai composite reliability maupun cronbach alpha di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

3. Uji Model Struktural atau Inner

Model Model struktural atau inner model menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada substantive theory.

a. R-Square

Dalam menilai model struktural terlebih dahulu menilai RSquare untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji goodness-fit model. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai RSquare 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah (Ghozali & Latan, 2015).

b. F-Square

Uji f-square ini dilakukan untuk mengetahui kebaikan model. Nilai fsquare sebesar 0,02, 0,15 dan 0,35 dapat diinterpretasikan apakah prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural (Ghozali, 2011).

c. Estimate For Path Coefficients

Uji selanjutnya adalah melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi T statistik yaitu melalui metode bootstrapping (Ghozali & Latan, 2015).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum Kabupaten Langkat

4.1.1 Kondisi geografi

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara Geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"– 4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00" – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan. Area Kabupaten Langkat memiliki batas-batas wilayah antara lain:

- Utara : berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka
- Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Karo
- Barat : berbatasan dengan Provinsi Aceh
- Timur : berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai



Gambar 4.1 **Peta Wilayah Kabupaten Langkat**

Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Langkat dapat digolongkan atas tiga bagian, yaitu:

- a. Wilayah pesisir pantai dengan ketinggian 0– 4 m di atas permukaan laut.
- b. Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 4 – 30m di atas permukaan laut.
- c. Wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 30 – 1.200 m di atas permukaan laut.

Keadaan kelerengan di daerah ini didominasi kelerengan 0 – 2 % sebesar 59,40 % dari luas Kabupaten Langkat. Kelerengan terkecil adalah kelerengan 15 – 40 % sebesar 6,8 % dari luas lahan.

B. Klimatologi

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Iklim di wilayah Kabupaten Langkat termasuk tropis dengan indikator iklim sebagai berikut :

- Musim Kemarau : Februari s/d Agustus
- Musim Hujan : September s/d Januari
- Curah hujan rata-rata 2.205,43 mm/tahun
- Suhu rata-rata 28 derajat celcius - 30 derajat celcius

4.1.2 Kondisi pemerintahan

Kabupaten langkat memiliki 23 kecamatan dan 277 desa, dimana kecamatan dengan luas daerah terbesar adalah Kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 km² atau 17,59 % diikuti Kecamatan Batang Serangan dengan luas

899,38 km² atau 14,05%. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Binjai dengan luas

42,05 km² atau 0,67% dari total luas wilayah Kabupaten Langkat. Sedangkan jumlah desa yang terbanyak berasal dari Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Tanjung Pura dengan jumlah desa 19 desa diikuti Kecamatan Salapian dan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa	Ibukota Kecamatan
-----	-----------	-------------------------	-------------	-------------------

Secanggih dengan jumlah 17 desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terendah yaitu Kecamatan Binjai dengan jumlah 5 desa.

Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Langkat

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.bps.go.id)

1.	Bahorok	1 101,83	19	Pekan Bahorok
2.	Serapit	98,50	10	Serapit
3.	Salapian	221,73	17	Minta Kasih
4.	Kutambaru	236,84	1101.83	17.5% Kutambaru
5.	Sei Bingai	333,17	98.50	16 1.57 Namu Ukur
6.	Kuala	206,23	221.73	3.54 Pekan Kuala
7.	Selesai	167,73	236.84	16 3.78 Pekan Selesai
8.	Binjai	42,05	333.17	14 5.32 Kwala Begumit
9.	Stabat	108,85	206.23	7 3.29 Stabat Baru
10.	Wampu	194,21	167.73	12 0.68 Bingai
11.	Batang Serangan	899,38	42.50	7 Batang Serangan
12.	Sawit seberang	209,10	8	Sawit seberang
13.	Padang Tualang	221,14	7	Tanjung Selamat
14.	Hinai	105,26	12	Tanjung Beringin
15.	Secanggih	231,19	13	Hinai Kiri
16.	Tanjung Pura	179.61	17	Pekan Tanjung
17.	Gebang	178,49	19	Pekan Gebang
18.	Babalan	76,41	11	Pelawi Utara
19.	Sei. Lapan	280,68	8	Alur Dua
20.	Brandan Barat	89,80	14	Tangkahan Durian
21.	Besitang	720,74	7	Pekan Besitang
22.	Pangkalan Susu	151,35	9	Pangkalan Susu
23.	Pematang Jaya	209,00	11	Pematang Jaya
	Jumlah	6263,29	277	

Tabel 4.2
Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Langkat

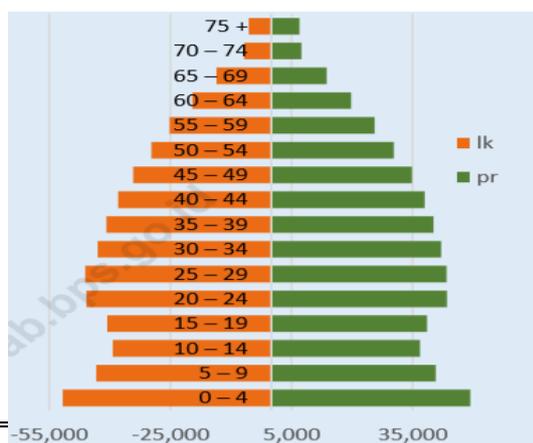
9	Stabat	108.85	1.74
10	Wampu	194.21	3.10
11	Batang Serangan	899.93	14.36
12	Sawit Seberang	209.10	3.34
13	Padang Tualang	221.14	3.53
14	Hinai	105.26	1.68
15	Secanggih	231.19	3.69
16	Tanjung Pura	179.61	2.87
17	Gebang	178.49	2.85
18	Babalan	76.41	1.22
19	Sei Lapan	280.68	4.48
20	Brandan Barat	89.80	1.43
21	Besitang	720.74	11.51
22	Pangkalan Susu	151.35	2.42
23	Pematang Jaya	209.00	3.34
Langkat		6263.74	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.bps.go.id)

4.1.3 Kondisi Demografi

A. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Langkat didominasi oleh penduduk muda/dewasa atau bisa dibilang didominasi oleh generasi Z dan milenial. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997-2012, perkiraan usia sekarang 10-25 tahun. Generasi milenial lahir tahun 1981-1996 perkiraan usia sekarang 26-41 tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.bps.go.id)

Gambar 4.2
Piramida Penduduk Kabupaten Langkat (jiwa), 2021

Dapat dilihat dari gambar 4.3 di atas proporsi generasi z sebanyak 23,65% dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 24,71% dari total populasi Kabupaten Langkat. Kedua generasi ini termasuk ke dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.3
Indikator Kependudukan Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (jiwa)	1 041 775	1 030 202	1 034 519
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,62	0,61	0,42
Kepadatan Penduduk(jiwa/km ²)	166	165	165
Sex ratio (L/P) (%)	101,4	102,2	102,3
Jumlah Rumah Tangga	256 025	257 178	253 766
Rata-rata ART (jiwa/ruta)	4,07	4,00	4,08
Persentase penduduk menurut kel.umur			
0-14 tahun	29,68	25,53	25,24
15-64 tahun	65,35	69,52	69,52
65+ tahun	4,97	4,95	5,23

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Dapat dilihat pada tabel 4.3 selama tahun 2020-2021 tingkat pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 0,42%, dilihat pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Langkat yaitu sebanyak 1.034.519 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2021 yaitu sebanyak 165 jiwa/km² dengan nilai sex ratio yang memiliki makna bahwa di setiap 100 penduduk terdapat 105 penduduk laki-laki dibandingkan perempuan, hal ini dapat terlihat dari sex ratio yang nilainya sebesar 102,3.

B.Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Langkat mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2021, sedangkan upah minimum kabupaten (UMK) tidak mengalami perubahan yakni sebesar 2,71 juta rupiah.

Tabel 4.4
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
TPAK (%)	68,82	69,92	69,12
Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	5,28	7,02	5,12
Bekerja (%)	65,18	65,01	94,88
UMK (000 Rp)	2 498	2 711	2 711
UMP (000 Rp)	2 303	2 499	2 499
Bekerja di sektor Agrikultur (%)	42,67	40,19	39,12
Bekerja di sektor Manufaktur(%)	16,45	21,31	19,77
Bekerja di sektor barang dan jasa(%)	40,88	38,51	41,11

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.4 diatas dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) ada 69,12% penduduk Langkat tahun 2021 termasuk dalam angkatan kerja. Sektor jasa-jasa mendominasi pasar kerja di Kabupaten Langkat sebesar 41,11% pada tahun 2021 yang diikuti dengan sektor pertanian sebesar 39,12%. Sementara pekerja manufaktur sebanyak 19,77%. UMK langkat pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yakni 2.711 rupiah. Upah Minimum Provinsi (UMP) juga dengan tahun 2020 yakni sebesar 2.499 ribu rupiah. TPT Kabupaten Langkat 2021 sebesar 5,12% menurun dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah pengangguran yang cukup signifikan di daerah Kabupaten Langkat.

4.1.4 Kondisi Ekonomi

A.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat mengalami peningkatan sebesar 3,08%. Tingkat produktivitas nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Langkat menduduki peringkat ketiga di provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.5
Jumlah Nilai Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Langkat

Produk Domestik Regional Bruto	Tahun		
	2019	2020	2021
PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha	42.515,18	43.208,00	46.301,20
Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran	5,07	-	3,08
Distribusi PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran	100,00	100,00	100,00
PDRB atas dasar harga konstan2010 menurut pengeluaran	29.597.772,36	29.343.355,98	30.247.338,87
PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran	42.515.176,42	43.207.997,58	46.301.203,75
Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan	5,07	-	3,08
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha	100,00	100,00	100,00
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha	29.597,77	29.343,26	30.247,39
Laju Implisit PDRB menurut pengeluaran	2,51	1,50	2,51
Pertumbuhan Ekonomi	5,02	5,07	-0.86
Laju indeks implisit PDRB menurut lapangan usaha	-	-	-
Indeks implisit PDRB menurut lapangan usaha	143,64	-	-
Indeks perkembangan PDRB seri 2010 ADHB menurut lapangan usaha	291,58	-	-
Indeks perkembangan PDRB seri 2010 ADHK menurut lapangan usaha	181,39	-	-

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.5 diatas pada tahun 2021 PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Langkat sebesar 46.301,20 milyar rupiah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 43.208,00 milyar rupiah. Sedangkan PDRB

atas dasar harga konstan Kabupaten Langkat sebesar 30.247.338,87 milyar rupiah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 29.343.255,98 milyar rupiah. Kondisi perekonomian Kabupaten Langkat menunjukkan pergerakan menurun dari 5,07% pada tahun 2019 menjadi -0,86% pada tahun 2020.

B. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menunjukkan besarnya kemampuan masing-masing kategori ekonomi dalam menciptakan nilai tambah, sekaligus menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi barang dan jasa masing-masing kategori ekonomi.

Tabel 4.6
Peranan PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019-2021

Lapangan Usaha	Tahun		
	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,74	39,57	40,30
Pertambangan dan Penggalian	9,54	9,22	9,31
Industri Pengolahan	15,79	15,89	16,02
Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,20	0,20
Pengadaan air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04
Konstruksi	7,63	7,42	7,34
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,29	11,19	10,98
Transportasi dan Pergudangan	2,43	2,23	2,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,15	2,03
Informasi dan Komunikasi	1,04	1,14	1,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	1,92	1,92
Real Estat	3,06	3,08	2,96
Jasa Perusahaan	0,60	0,58	0,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,42	3,48	3,24
Jasa Pendidikan	1,15	1,18	1,14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,52	0,49
Jasa Lainnya	0,22	0,21	0,20

PDRB	100.00	100.00	100.00
-------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas sumbangan terbesar tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 40,30%, diikuti dengan industri pengolahan 16,02% dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,98%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing dibawah 10%. Kontribusi lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang terhadap PDRB masing-masing sebesar 0,20% dan 0,40%.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Langkat pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, laju pertumbuhan PDRB Langkat tahun 2021 sebesar 3,08% sedangkan pada tahun 2020 sebesar -0,86%.

Ada 4 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif dari 17 lapangan usaha yang ada. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi negatif tertinggi yaitu sebesar -0,55%, disusul dengan lapangan usaha jasa perusahaan dengan pertumbuhan sebesar -0,15%. Sedangkan 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan yang positif tertinggi adalah informasi dan komunikasi sebesar 5,39%, pengadaan air dan pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,42% serta pertambangan dan pengalihan sebesar 4,18% ditunjukkan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha

	Laju pertumbuhan atas dasar	Sumber pertumbuhan
--	-----------------------------	--------------------

Lapangan Usaha		harga konstan			Atas dasar harga konstan		
		2019	2020*)	2021**)	2019	2020*)	2021**)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Per-ikanan	5,69	1,06	3,78	2,44	0,46	1,66
B.	Pertambangan dan Penggalian	5,88	(2,16)	4,18	0,58	-0,21	0,41
C.	Industri Pengolahan	2,88	(1,93)	2,26	0,41	-0,27	0,31
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,44	2,15	3,06	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,77	3,47	5,42	0,00	0,00	0,00
F.	Konstruksi	4,88	(4,38)	3,10	0,36	-0,32	0,22
G.	Perdagangan Besar dan Ecer-an, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,71	(2,48)	2,52	0,37	-0,24	0,24
H.	Transportasi dan Pergudangan	7,00	(9,38)	(0,55)	0,15	-0,20	-0,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	(7,45)	1,26	0,18	-0,16	0,03
J.	Informasi dan Komunikasi	8,82	9,59	5,93	0,12	0,13	0,09
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,63	0,21	3,94	0,07	0,00	0,07
L.	Real Estat	5,06	0,40	0,14	0,14	0,01	0,00
M,N	Jasa Perusahaan	5,62	(5,33)	(0,15)	0,03	-0,03	-0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,97	(0,49)	(0,14)	0,12	-0,01	-0,00
P.	Jasa Pendidikan	5,12	0,48	3,67	0,06	0,01	0,04
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,36	(1,80)	(0,14)	0,03	-0,01	-0,00
R,S T,U	Jasa Lainnya	7,82	(7,11)	2,88	0,02	-0,01	0,01
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,07	(0,86)	3,08	5,07	-0,86	3,08

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

D. Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin

dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita Kabupaten Langkat sebesar 43% dari Kota Medan. Dari perbandingan antar Kabupaten/Kota terpilih, PDRB per kapita Kabupaten Langkat tahun 2021 sebesar 44,76 juta rupiah, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Serdang bedagai yang mencapai 45,94 juta rupiah. Berdasarkan PDRB per kapita terlihat ketimpangan yang sangat tinggi, PDRB total atas dasar harga berlaku tertinggi se Sumatera Utara tercatat di Kota Medan yang mencapai 254.721,32 milyar rupiah pada 2021, sementara Kabupaten Langkat mencapai 46.301,2 milyar rupiah.

Tabel 4.8
Nilai Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita di Kabupaten Langkat, 2019-2021

PDRB Per Kapita	2019	2020	2021
PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010	28.383.253,00	28.520.913,00	29.238.118,00
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	40.770.602,00	41.997.095,00	44.756.262,00

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.bps.go.id)

Dapat dilihat pada Tabel 4.8 bahwa nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 nilai PDRB perkapitanya 28.383.353,00, pada tahun 2020 nilai PDRB perkapitanya 28.520.913,00 dan pada tahun 2021 nilai PDRB perkapitanya meningkat menjadi 29.238.118,00. Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 meningkat di bandingkan dengan tahun 2020. Dapat kita lihat pada Tabel 4.8 nilai PDRB perkapitanya pada tahun 2020 berjumlah 41.997.095,00 sedangkan Nilai PDRB perkapitanya pada tahun 2021 berjumlah 44.756,262,00.

E.Gini Ratio

Pada Maret 2021 gini ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,314, tidak terjadi perubahan gini ratio pada Maret 2021 terhadap September 2020. Pada Maret 2021. Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 21,78%, artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,26% dan di daerah pedesaan angkanya tercatat sebesar 24,65% yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah. Pola pengeluaran penduduk Kabupaten Langkat periode 2019-2021 lebih besar digunakan untuk konsumsi makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), kontribusi pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan selama periode 2019-2021 tidak mengalami perubahan yang berarti.

Tabel 4.9
Statistik Gini Ratio per Kapita Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
Pengeluaran Perkapita sebulan(Rp)	860 723	876 791	936 925
• Makanan	499 495	494 844	557 130
• Non makanan	361 228	381 947	379 795
Golongan Pengeluaran perKapita sebulan (%)	100.00	100.00	100.00
• <200 000	-	-	-
• 200.000 – 299.999	0,17	0,19	0,03
• 300.000 – 499.999	16,74	9,96	4,14
• Lebih dari 500.000	83,09	89,85	95,83

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.8 di atas tahun 2021 pengeluaran makanan dan bukan

makanan masing-masing sebesar 59,46% dan 40,54%. Penduduk yang golongan pengeluaran per kapita sebulan yang banyak di Kabupaten Langkat adalah golongan pengeluaran di atas Rp500.000 atau sebesar 95,83%, tidak ada lagi penduduk di Kabupaten Langkat dengan golongan pengeluaran per kapita sebulan dibawah Rp200.000.

4.1.5 Kondisi Sosial

A. Pendidikan

Upaya pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Langkat terus dilakukan baik dengan penyediaan/peningkatan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru PNS dan guru honorer yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah setiap tingkatan pendidikan maupun mutu/kualitasnya

Tabel 4.10
APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Langkat
Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI/Sederajat	98,64	99,74	110,83	110,41
SMP/MTs/Sederajat	78,97	81,65	90,17	88,47
SMA/SMK/MA/Sederajat	65,31	77,98	102,91	101,43
Perguruan Tinggi	8.96	9.69	7.94	6.91

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.10 jenjang pendidikan pada tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 99,74% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 110,41% untuk jenjang SMP Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 81,65% dan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 88,47%. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sebesar 77,98% untuk

Angka Partisipasi Murni (APM) dan 101,43% untuk Angka Partisipasi Kasar (APK). Untuk perguruan tinggi, Angka partisipasi Murni (APM) sebesar 9,69% dan untuk Angka Partisipasi Kasar yaitu 6,91%. Pada tahun 2021, angka buta huruf paling tinggi pada kelompok umur 65 tahun ke atas yaitu sebanyak 7,99%.

B. Kesehatan

Tabel 4.11
Statistik Tenaga Kesehatan Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
Dokter	40,27	49,76	43,78
Bidan/perawat/tenaga kesehatan lainnya	59,73	50,24	55,7
Dukun	0,00	0,00	0,53
Angka Harapan Hidup	68,59	68,80	68,97
Angka Kesakitan (%)	12,06	14,62	9,12

Sumber: Statkesra Provinsi Sumatera Utara 2021 dan IPM 2021 (www.bps.go.id)

Dapat dilihat pada Tabel 4.11 diatas persentase tertinggi penolong kelahirandi Kabupaten Langkat dilakukan leh Bidan dan teanag kesehatan lainnya yakni mencapai 55,7%, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, balita yang proses kelahirannya ditolong oleh dokter mencapai 43,78% menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.12
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Langkat Tahun 2020-2021

Tahun	Rumah Sakit Umum	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik	Apotik
2020	7	-	32	1 308	43	55
2021	7	-	35	1 308	38	58

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.12 sarana kesehatan sangat diperlukan oleh masyarakat banyak untuk menunjang perbaikan kualitas hidup. Peningkatan sarana dan prasarana maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus diupayakan oleh pemerintah. Banyaknya fasilitas kesehatan tahun 2021 di Kabupaten Langkat untuk Rumah Sakit Umum sebanyak 7 unit, Puskesmas meningkat menjadi 35

unit, sementara itu Posyandu tetap 1 308 unit, Klinik menjadi 38 unit, Apotek meningkat menjadi 58 unit dan Rumah Sakit bersalin sudah tidak ada lagi karena dialihkan ke Rumah Sakit Umum.

C. Infrastruktur Jalan

Hubungan darat antar kecamatan dapat melalui jalur jalan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana khususnya yang menjadi penghubung antar kecamatan maupun desa. Banyak hutan yang dimanfaatkan untuk pembukaan jalan baru sehingga memudahkan transportasi dari desa ke ibukota kecamatan. Pada tahun 2021, panjang jalan mencapai 1.561.3 km dengan kondisi baik sampai rusak berat dan permukaan yang di aspal sampai berupa tanah.

Tabel 4.13
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Langkat (km)
2019-2021

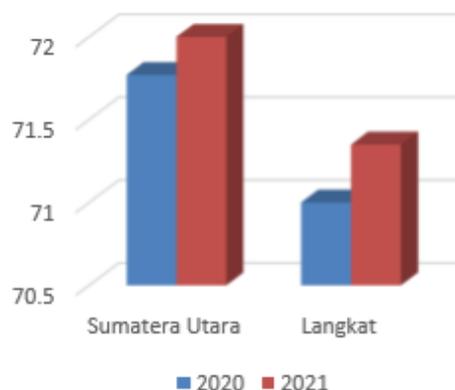
Kondisi Jalan	2019	2020	2021
Baik	388 850	811 560	657 772
Sedang	393 440	54 000	273 445
Rusak	698 350	1 200	451 264
Rusak Berat	80 670	694 540	178 869
Jumlah	1 561 300	1 561 300	1 561 300

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Dilihat dari Tabel 4.13 di atas jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. Dilihat dari kondisinya, jalan di Kabupaten Langkat pada tahun 2021 mayoritas dalam kondisi rusak dengan panjang jalan 451.264 km dan jalan dengan kondisi baik sepanjang 657.772 km.

D. Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Gambar 4.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat 2020-2021

Pada gambar 4.3 diatas selama periode tahun 2020-2021 angka IPM Kabupaten Langkat meningkat yakni tahun 2020 sebesar 71,00 naik menjadi 71,35 pada tahun 2021. Angka IPM ini sudah berada pada kriteria tinggi, namun pemerintah harus tetap memberi perhatian terhadap pembangunan manusianya agar produktivitas masyarakat semakin meningkat dan bermanfaat bagi modal pembangunan dan bukan menjadi beban pembangunan. IPM Kabupaten Langkat menduduki peringkat ke 16 dari 25 Kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatera Utara.

E. Kemiskinan

Tabel 4.14
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	103 080	101 870	106 590
Penduduk Miskin(%)	9,91	9,73	10,12
IPM	70,76	71,00	71,35

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Berdasarkan Tabel 4.10 penduduk miskin di Kabupaten Langkat pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 9,73% pada tahun 2020 naik menjadi 10,12% pada tahun 2021.

4.2 Analisis perkembangan Number of poor people (jumlah penduduk miskin), Head Count Index (persentase penduduk miskin), Poverty Gap Index (indeks kedalaman kemiskinan), Poverty Severity Index (indeks keparahan kemiskinan)di Kabupaten Langkat sebelum dan setelah Pandemi Covid-19.

Pandemi COVID-19 (Corona Virus Deasease 2019) adalah wabah penyakit berupa sekelompok virus jahat yang menyerang seluruh penjuru dunia, pertama kali muncul di Negara China Wuhan pada tahun 2019 yang dikenal dengan sebutan virus corona. Dalam penelitian mengatakan bahwa banyaknya korban yang meninggal dunia akibat pandemi ini menjadi pusat perhatian seluruh Negara termasuk Indonesia sendiri. Di Indonesia COVID-19 ini menular pada akhir bulan maret 2020 berdasarkan data dari gugus yang bertugas dalam percepatan penanganan COVID-19 bahwa kasus pasien yang terinfeksi ada 114 orang dan meningkat mencapai 347 orang pada akhir April 2020 . COVID-19 ini menimbulkan dampak untuk manusia baik dari segi perekonomian, pendidikan, sosial dan sebagainya yang merugikan berbagai pihak termasuk masyarakat kelas bawah, sehingga dalam hal ini sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan, melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Selain peran pemerintah dalam membuat program mencegah COVID-19, kebijakan dari setiap

Desa dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 juga dilakukan dengan mengalokasikan dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa (Dewi et al., 2021). Kesejahteraan masyarakat akan terjalin dengan baik jika SDM dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan kekayaan alam. Kesejahteraan masyarakat juga perlu diperhatikan keadaannya maupun tempat tinggalnya, tempat tinggal yang layak juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan (Bawenti et al., 2019; Ferezagia, 2018; Julianto, 2020; Mukhlis et al., 2021). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu:

1. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan) yang memberikan Gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Untuk melihat perbandingan kondisi kemiskinan dari berbagai indikator penentu kemiskinan menurut BPS sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 dilakukanlah analisa ekonomi secara deskriptif dengan data pada tabel 4.14.

Tabel 4.15

Perbandingan indikator kemiskinan di Kabupaten Langkat , Provinsi Sumatera Utara Dan Indonesia sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19

Indikator	Langkat			Sumut			Indonesia		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Number of poor people (jumlah penduduk miskin) (ribu jiwa)	103,08	101,87	106,59	1.282,04	1.283,29	1.343,86	24.785,87	25.548,69	26.503,65
Head Count Index (persentase penduduk miskin)	9,91	9,73	10,12	8,63	8,75	9,01	9,22	10,19	9,71
Poverty Gap Index (indeks kedalaman kemiskinan)	0,90	1,52	1,17	1,46	1,48	1,60	1,50	1,61	1,71
Poverty Severity Index (indeks keparahan kemiskinan)	0,14	0,33	0,23	0,33	0,37	0,45	0,36	0,68	0,42

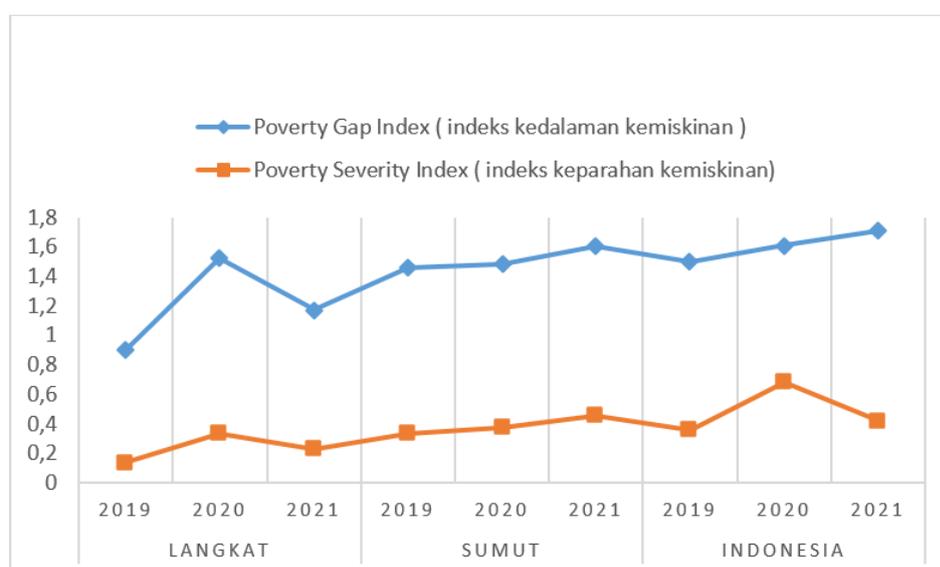
Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Pada tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Langkat sebanyak 103,08 ribu jiwa, berkurang 1.210 jiwa di tahun 2020 menjadi 101,87 jiwa, namun kembali melonjak pada tahun 2021 menjadi 106,59 ribu jiwa. Begitu pula dengan persentase penduduk miskin mengalami penurunan 0,18 persen menjadi 9,73 persen di tahun 2020, akan tetapi juga mengalami kenaikan sebesar 0,93 persen menjadi 10,12 persen di tahun 2021. Namun demikian, besarnya kenaikan dan fluktuasi angka kemiskinan di Kabupaten Langkat hingga kini cenderung terjaga dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Kabupaten langkat merupakan peringkat ke 2 tingkat kemiskinan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara setelah kota Medan.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.282,04 ribu jiwa atau sebesar 8,63 persen terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut terus melonjak pada

tahun 2020 hingga 2021. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.283,29 ribu jiwa atau sebesar 8,75 persen pada September 2020, dimana terjadi kenaikan sebesar 60,57 ribu jiwa atau sebesar 0,26 jumlah penduduk miskin sebanyak 83,65 ribu jiwa pada periode September 2020 - September 2021, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,65 poin.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26.503,65 ribu jiwa. Atau sebesar 9,71 persen , jumlah penduduk miskin menurun 1,04 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 954,96 ribu jiwa . Persentase penduduk miskin pada 2021 tercatat sebesar 9,71 persen, menurun 0,48 persen dari 2020 penurunan ini terjadi setelah mengalami kenaikan dari tahun 2019.



Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Gambar 4.4

Poverty Severity Index (indeks kedalaman kemiskinan) dan Poverty Gap Index (indeks keparahan kemiskinan) di Kabupaten Langkat , Provinsi Sumatera Utara Dan Indonesia

Dari gambar diatas dapat dilihat pada tahun 2019 indeks kedalaman kemiskinan di kabupaten langkat menunjukkan 0,9%, tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan di kabupaten langkat mengalami kenaikan sebesar 0,62% menjadi 1,52%, kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 0,35% menjadi 1,17%. Begitu pula pada indeks keparahan kemiskinan di kabupaten langkat terus mengalami fluktuasi disetiap tahunnya.

pada tahun 2019 indeks kedalaman kemiskinan di provinsi sumatera utara menunjukkan 1,46%, tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan di provinsi sumatera utara mengalami kenaikan sebesar 0,2% menjadi 1,48%, kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,12% menjadi 1,60%. Begitu pula pada indeks keparahan kemiskinan di kabupaten langkat terus mengalami fluktuasi disetiap tahunnya.

pada tahun 2019 indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia menunjukkan 1,50%, tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan di provinsi sumatera utara mengalami kenaikan sebesar 0,11% menjadi 1,61%, kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,10% menjadi 1,71%. Begitu pula pada indeks keparahan kemiskinan di kabupaten langkat terus mengalami fluktuasi disetiap tahunnya.

4.3 Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa Terhadap Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Di Desa Pesisir Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

4.3.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian yaitu rumah tangga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa di wilayah pesisir di Kecamatan Brandan Barat yaitu Desa Perlis, Desa Klantan, Dan Desa Lubuk Kertang.

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu tentang gambaran karakteristik responden yang dijadikan sample pada penelitian ini yang meliputi Jenis Kelamin, umur dan profesi. Berdasarkan tanggapan responden dari data kuisisioner yang terkumpul, maka hasil dari identifikasi karakteristik responden ialah sebagai berikut:

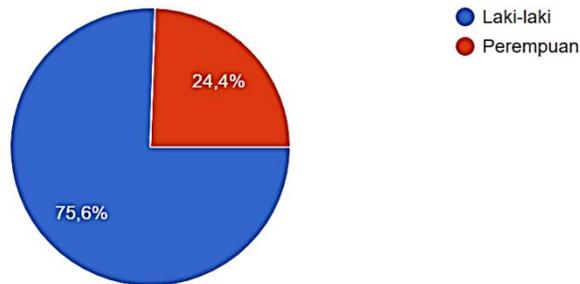
Tabel 4.16
Karakteristik Responden

Variabel	Klasifikasi	Jumlah Responden	
		Nominal	(%)
Jumlah Kuisisioner	Disebar	40	100%
	Tidak kembali	0	0%
	Tidak dapat diolah	0	0%
	Dapat diolah	40	100%

Data penelitian diperoleh dari hasil kuisisioner yang telah disebarkan kepada seluruh responden yang berjumlah 40 orang. Hasil kuisisioner dapat dilihat pada Gambar Grafik dibawah ini:

4.3.2 Data Identitas Responden

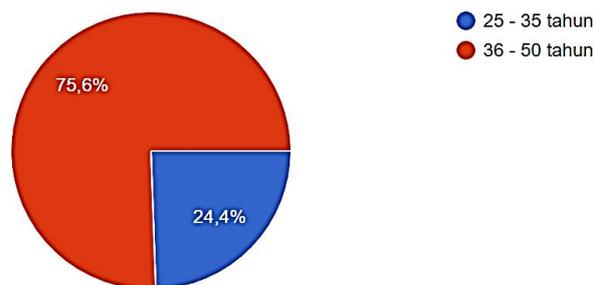
1. Jenis Kelamin



Gambar 4.5

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya dari 40 responden kepala keluarga rumah tangga miskin di desa pesisir kecamatan brandan barat. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang berjenis kelamin Laki-laki ada sebanyak 30 responden, dan responden yang berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 10 responden dari jumlah responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga pada rumah tangga miskin di desa pesisir kecamatan brandan barat mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

2. Usia

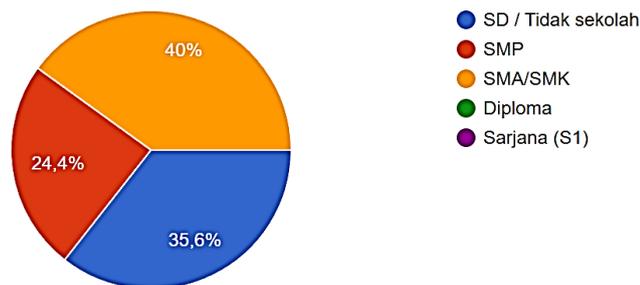


Gambar 4.6

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya dari 40 responden kepala keluarga rumah tangga miskin di desa pesisir kecamatan brandan barat. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 10 responden (24,4%), untuk responden yang berusia 36-50 tahun ada sebanyak

30 responden (75,6%), hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga rumah tangga miskin di desa pesisir kecamatan brandan barat yang berkewajiban mencari nafkah mayoritas berusia lanjut.

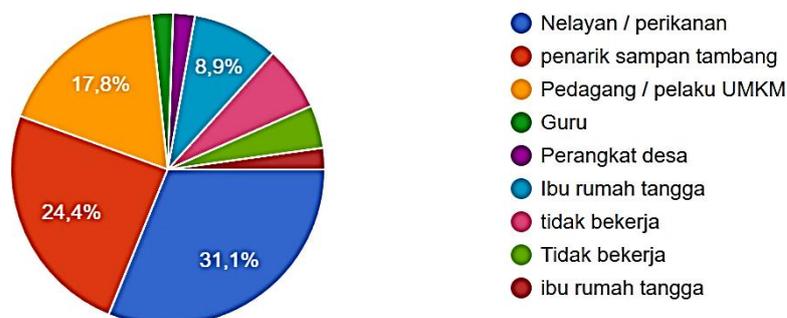
3. Pendidikan



Gambar 4.7

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya dari 40 responden kepala keluarga rumah tangga miskin di desa pesisir kecamatan brandan barat. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang SMA/SMK ada sebanyak 16 responden (40%), untuk responden yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang SMP ada sebanyak 10 responden (24,4%), dan responden yang menempuh pendidikan hanya sampai ke jenjang SD atau bahkan tidak bersekolah sebanyak 14 responden (35,6%).

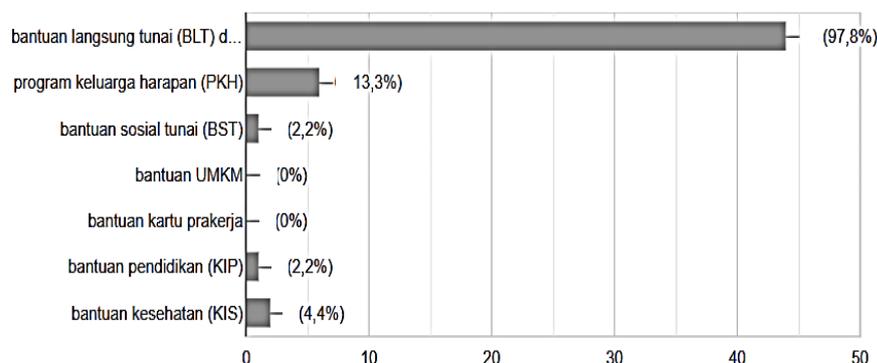
4. Pekerjaan



Gambar 4.8

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya dari 40 responden kepala keluarga rumah tangga miskin di desa pesisir kecamatan brandan barat. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga ada sebanyak 9 responden (22,2%), untuk responden yang bekerja sebagai guru ada sebanyak 1 responden (2,2%), untuk responden yang bekerja sebagai perangkat desa ada sebanyak 1 responden (2,2%), untuk responden yang bekerja sebagai pedagang / pelaku UMKM ada sebanyak 7 responden (17,8%), untuk responden yang bekerja sebagai penarik sampan tambang ada sebanyak 10 responden (24,4%), dan untuk responden yang bekerja sebagai nelayan ada sebanyak 12 responden (31,1%).

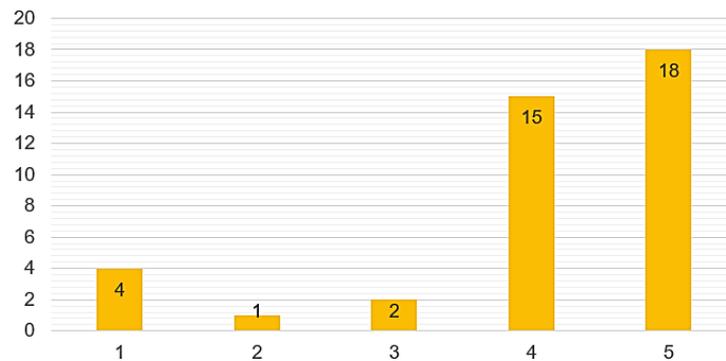
5. Penerima bantuan

**Gambar 4.9**

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya dari 40 responden kepala keluarga rumah tangga miskin di desa pesisir kecamatan brandan barat. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden sebagian besar adalah penerima Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa.

4.3.3 Kemudahan penggunaan

1. Program BLT - Dana Desa yang telah berjalan mampu

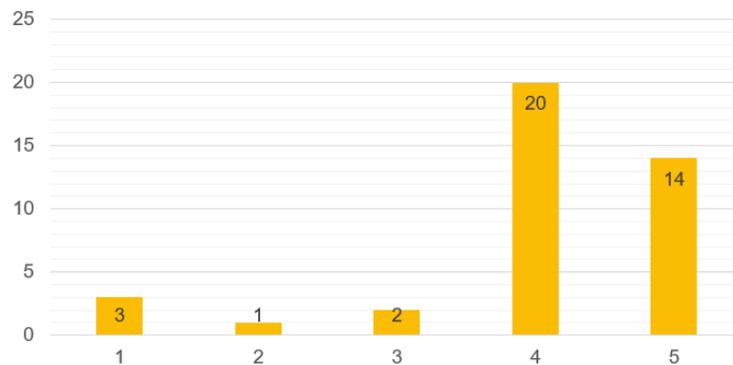


mengentaskan kemiskinan.

Gambar 4.10

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 5 responden menyatakan tidak setuju dengan program BLT - Dana Desa yang telah berjalan mampu mengentaskan kemiskinan, dan 35 responden menyatakan setuju dengan program BLT - Dana Desa yang telah berjalan mampu mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa program BLT - Dana Desa telah dianggap mampu untuk membantu pemerintah dalam penanganan kemiskinan di daerah pesisir Kecamatan Brandan Barat.

2. Prosedur program BLT - Dana Desa mudah dipahami.

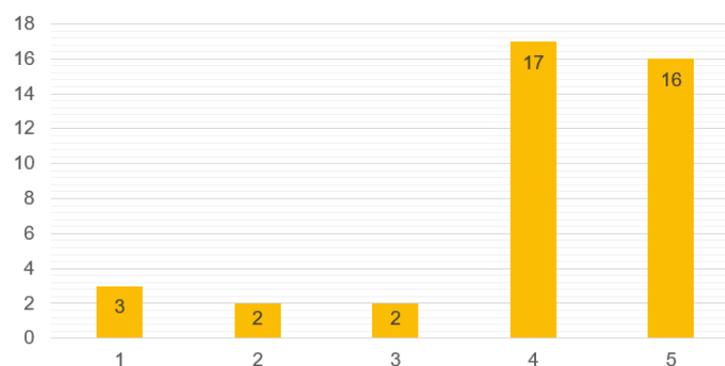


Gambar 4.11

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 4 responden menyatakan tidak setuju dengan prosedur program BLT - Dana Desa mudah dipahami, dan 36 responden menyatakan setuju dengan prosedur program BLT - Dana Desa mudah dipahami. Dalam hal ini menunjukkan bahwa prosedur program BLT - Dana Desa telah dianggap mudah dipahami dalam proses pembagian ataupun dalam proses pendataan bagi penerima bantuan di daerah pesisir Kecamatan Brandan Barat.

3. Program BLT - Dana Desa sangat membantu memenuhi kebutuhan

**pokok
sehari-
hari.**

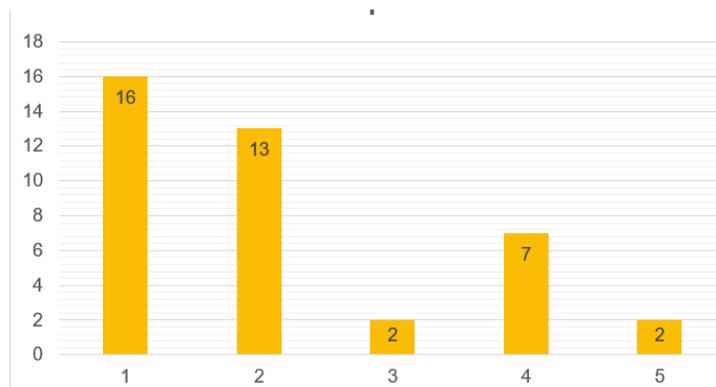


Gambar 4.12

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 5 responden menyatakan tidak setuju dengan Program BLT - Dana Desa sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan 35 responden menyatakan setuju dengan prosedur Program BLT - Dana Desa sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Program BLT - Dana Desa sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari telah dianggap dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi penerima bantuan di daerah pesisir Kecamatan Brandan Barat.

4. Program BLT - Dana Desa mampu untuk menambah pemenuhan

untuk



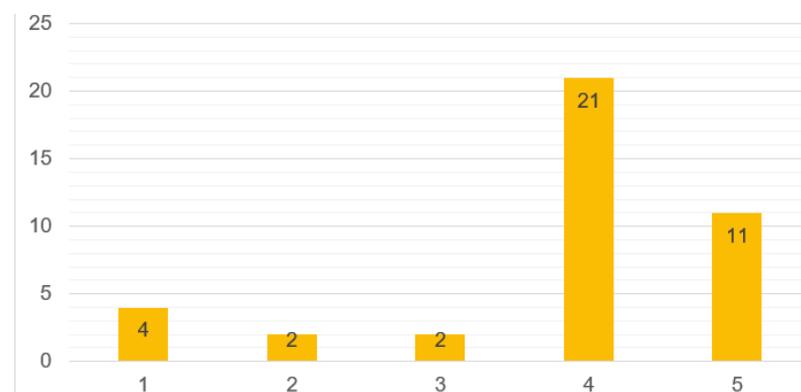
menabung bagi penerima setiap bulannya.

Gambar 4.13

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 29 responden menyatakan tidak setuju dengan Program BLT - Dana Desa mampu untuk menambah

pemenuhan untuk menabung bagi penerima setiap bulannya, dan 11 responden menyatakan setuju dengan prosedur Program BLT - Dana Desa mampu untuk menambah pemenuhan untuk menabung bagi penerima setiap bulannya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Program BLT - Dana Desa dinilai tidak memenuhi kebutuhan menabung setiap bulannya bagi penerima bantuan di daerah pesisir Kecamatan Brandan Barat.

5. Program bantuan pemerintah lain lebih berpengaruh dalam



program pengentasan kemiskinan.

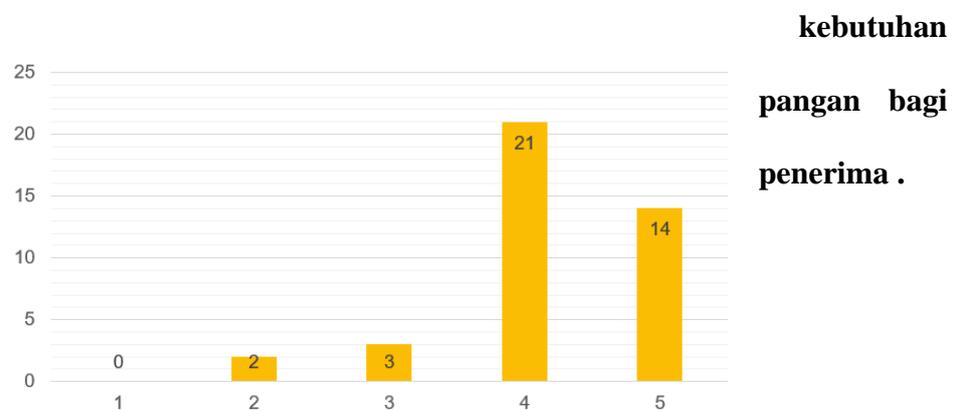
Gambar 4.14

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 8 responden menyatakan tidak setuju dengan Program bantuan pemerintah lain lebih berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan, dan 35responden menyatakan setuju

dengan Program bantuan pemerintah lain lebih berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini penerima BLT - Dana Desa menunjukkan bahwa Program BLT - Dana Desa dinilai kurang berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan di desa pesisir kecamatan Brandan Barat.

4.3.4 Pemenuhan kebutuhan dasar

1. program BLT - Dana Desa mampu untuk meningkatkan pemenuhan

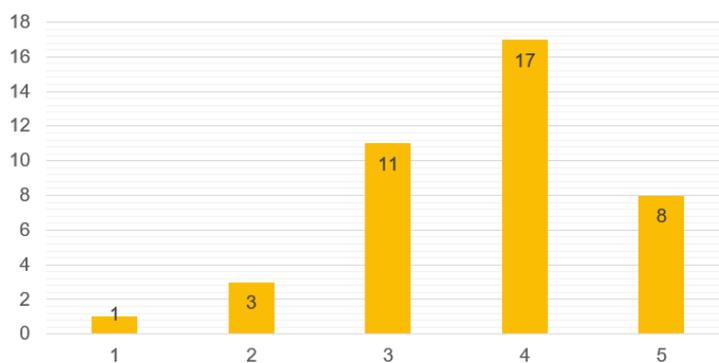


Gambar 4.15

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 2 responden menyatakan program BLT - Dana Desa mampu untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi penerima, dan 38 responden menyatakan program BLT - Dana Desa mampu untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi penerima. Dalam hal ini penerima BLT - Dana Desa menunjukkan bahwa Program BLT - Dana Desa dinilai dapat meningkatkan

memenuhi kebutuhan pangan bagi penerima BLT – Dana Desa di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat .

2. Program BLT - Dana Desa mampu untuk meningkatkan pemenuhan

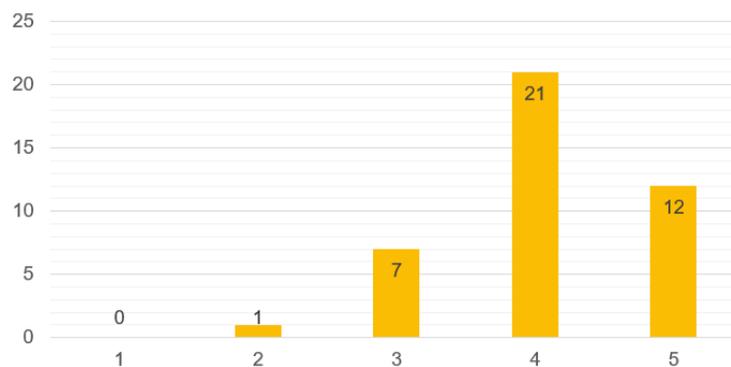


kebutuhan sandang bagi penerima.

Gambar 4.16

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 4 responden menyatakan dengan program BLT - Dana Desa yang telah berjalan tidak mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang , dan 46 responden lainnya menyatakan bahwa program BLT - Dana Desa yang telah berjalan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang bagi penerima BLT – Dana Desa di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat.

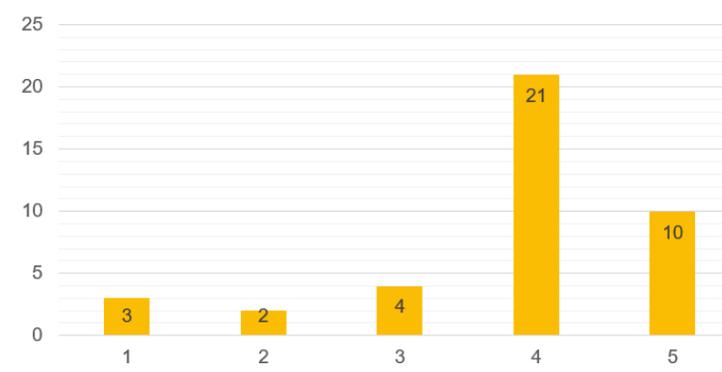
3. Program BLT - Dana Desa telah mampu untuk meningkatkan Pemenuhan Penghasilan Tetap/Pekerjaan bagi penerima.



Gambar 4.17

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 1 responden menyatakan dengan program BLT - Dana Desa yang telah berjalan tidak mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang , dan 49 responden menyatakan dengan program BLT - Dana Desa yang telah berjalan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang bagi penerima BLT – Dana Desa.di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat.

4. Program BLT - Dana Desa mampu meningkatkan Pemenuhan pendidikan untuk anggota keluarga.

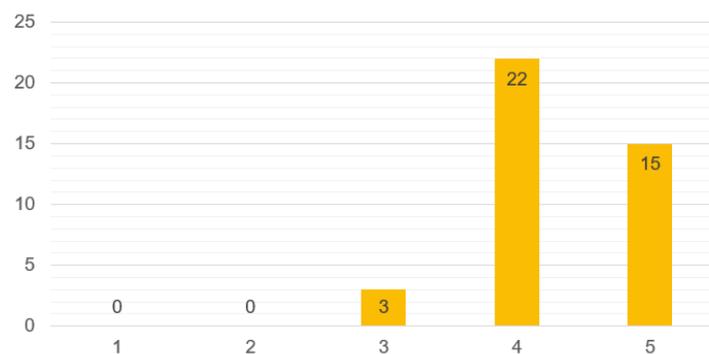


Gambar 4.18

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 5 responden menyatakan dengan program BLT - Dana Desa yang telah berjalan tidak mampu meningkatkan pemenuhan pendidikan bagi anggota keluarga , dan 35 responden menyatakan program BLT - Dana Desa yang telah berjalan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anggota keluarga bagi penerima BLT – Dana Desa.di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat.

4.3.5 Penyaluran BLT - Dana Desa - Dana Desa

1. Penyaluran dana program BLT - Dana Desa sudah sangat tepat



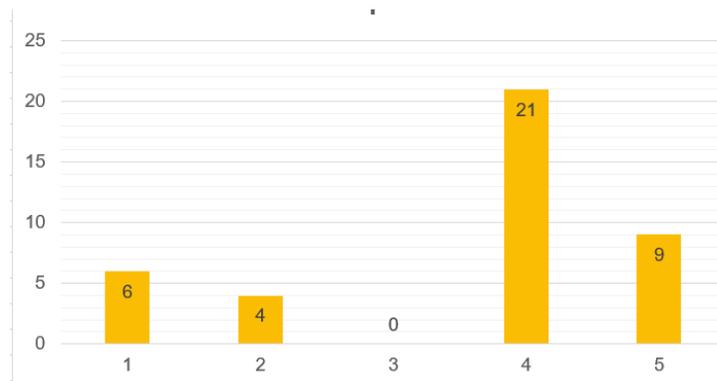
waktu.

Gambar 4.19

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 40 responden menyatakan program BLT - Dana Desa yang telah berjalan sangat tepat waktu dalam

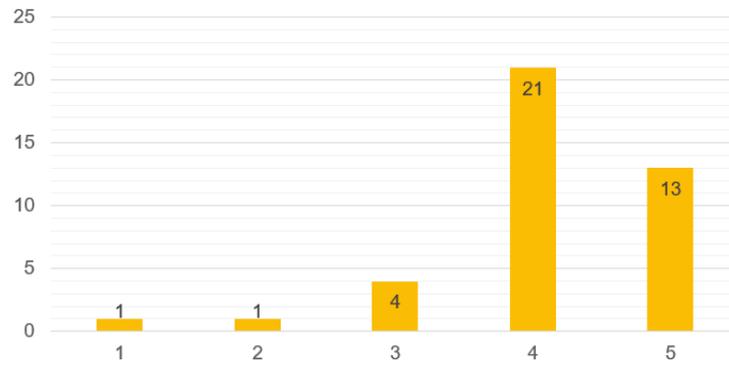
penyalurannya kepada penerima BLT – Dana Desa di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat.

2. Pembagian dana program BLT - Dana Desa dilakukan secara merata hanya kepada rumah tangga miskin.



Gambar 4.20

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 10 responden menyatakan penyaluran program BLT - Dana Desa dilakukan secara tidak merata hanya kepada rumah tangga miskin, dan 30 responden menyatakan bahwa penyalurannya dilakukan program BLT - Dana Desa dilakukan secara merata hanya kepada rumah tangga miskin penerima BLT – Dana Desa di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat.

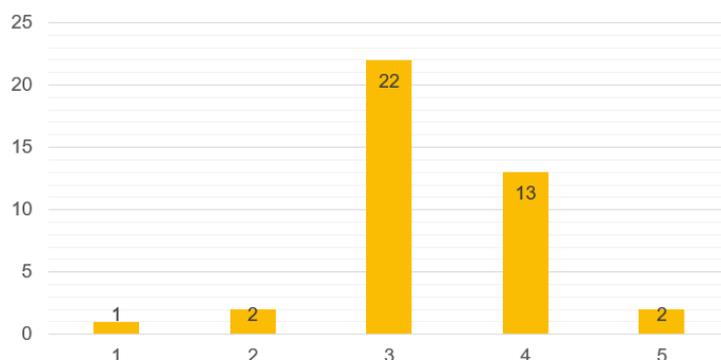


3. Program BLT - Dana Desa sesuai harapan rumah tangga miskin.

Gambar 4.21

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 2 responden menyatakan program BLT - Dana Desa tidak sesuai dengan harapan rumah tangga miskin , dan 38 responden menyatakan program BLT - Dana Desa sesuai dengan harapan rumah tangga miskin penerima BLT – Dana Desa.di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat.

4. Pemotongan dana program BLT - Dana Desa dapat membantu warga lainnya yang tidak terdaftar sebagai penerima .



Gambar 4.22

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 3 responden menyatakan Pemotongan dana program BLT - Dana Desa tidak dapat membantu warga lainnya yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT - Dana Desa, dan 37 responden menyatakan program BLT - Dana Desa dapat membantu warga lainnya yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT - Dana Desa. di desa pesisir Kecamatan Brandan Barat.

4.4 Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Penduduk di Kecamatan Brandan Barat

4.4.1 Convergent Validity

Convergent validity adalah salah satu dari pengukuran model pada indikator yang bersifat reflektif. Dimana dilihat dari skor butir pertanyaan dengan skor konstruknya atau melalui *loading factor* pada masing-masing indikator konstruk. Adapun parameter dalam menetapkan bahwa nilai *convergent validity* layak/terpenuhi dapat dilakukan dengan melihat nilai *rule of thumb*, dimana nilai *loading factor* lebih besar dari 0,60 – 0,70, namun dapat

juga diterima rentang *loading factor* lebih besar dari 0,50 – 0,60 (Ghozali dan Latan, ali dan Latan, 2012:74). Berdasarkan hasil analisis data pada *convergent validity* pada indikator-indikator pada masing-masing variabel, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. *Convergent Validity* pada Tingkat Kemiskinan

Dalam Indikator konstruk pada variabel tingkat kemiskinan tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.17
***Convergent Validity* Faktor Kemiskinan**

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
Y_F1	0,936	0,70	Memenuhi
Y_F2	0,911	0,70	Memenuhi
Y_F3	0,948	0,70	Memenuhi
Y_F4	0,923	0,70	Memenuhi
Y_F5	0,899	0,70	Memenuhi
Y_F6	0,593	0,70	Tidak Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable mahasiswa pengguna layanan BSI dengan 6 indikator pertanyaan terdapat 1 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai loading faktor $0,593 <$ dari nilai Rule of Thumb 0,70.

2. *Convergent Validity* Pendapatan

Dalam Indikator konstruk pada variabel pendapatan tentang pendapatan utama berjumlah 3 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.18
Convergent Validity Pendapatan Utama

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
X1_P1	-0,895	0,70	Tidak Memenuhi
X1_P2	0,904	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable Pendapatan Utama dengan 2 indikator pertanyaan terdapat 1 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai loading faktor $-0,895 <$ dari nilai Rule of Thumb 0,70.

3. Convergent Validity Tingkat Pendidikan

Dalam Indikator konstruk pada variabel tingkat pendidikan tentang tingkat pendidikan berjumlah 3 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.19

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
X2_T1	0,927	0,70	Memenuhi
X2_T2	0,660	0,70	Tidak Memenuhi
X2_T3	0,826	0,70	Memenuhi

Convergent Validity Tingkat Pendidikan

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable tingkat pendidikan dengan 3 indikator pertanyaan terdapat 1 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai loading faktor 0,660 $<$ dari nilai Rule of Thumb 0,70.

4. *Convergent Validity* Jumlah Tanggungan Keluarga

Dalam Indikator konstruk pada variabel tanggungan tentang jumlah tanggungan keluarga berjumlah 2 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
X3_J1	0,874	0,70	Memenuhi
X3_J2	-0,851	0,70	Tidak Memenuhi

tabel dibawah ini :

Tabel 4.20
***Convergent Validity* Jumlah Tanggungan Keluarga**

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable jumlah tanggungan keluarga dengan 2 indikator pertanyaan terdapat 1 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai loading faktor -0,851 < dari nilai Rule of Thumb 0,70.

5. *Convergent Validity* Pada Tempat Tinggal

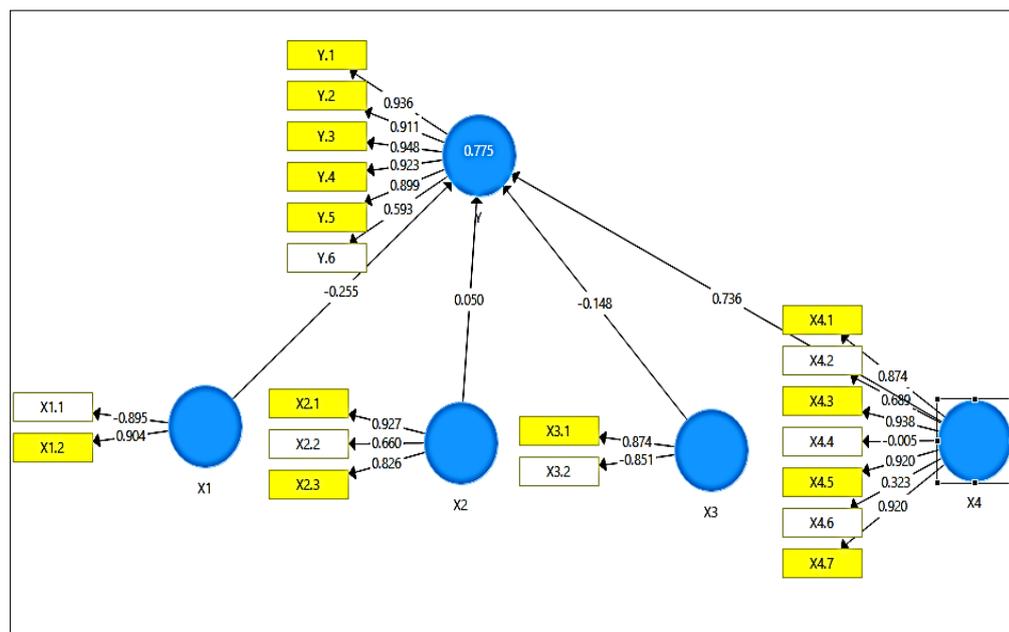
Dalam Indikator konstruk pada variabel tempat tinggal tentang kondisi tempat tinggal berjumlah 7 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.21
***Convergent Validity* Tempat Tinggal**

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
X4_K1	0,874	0,70	Memenuhi
X4_K2	0,689	0,70	Tidak Memenuhi
X4_K3	0,938	0,70	Memenuhi
X4_K4	0,005	0,70	Tidak Memenuhi
X4_K5	0,920	0,70	Memenuhi
X4_K6	0,323	0,70	Tidak Memenuhi
X4_K7	0,920	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

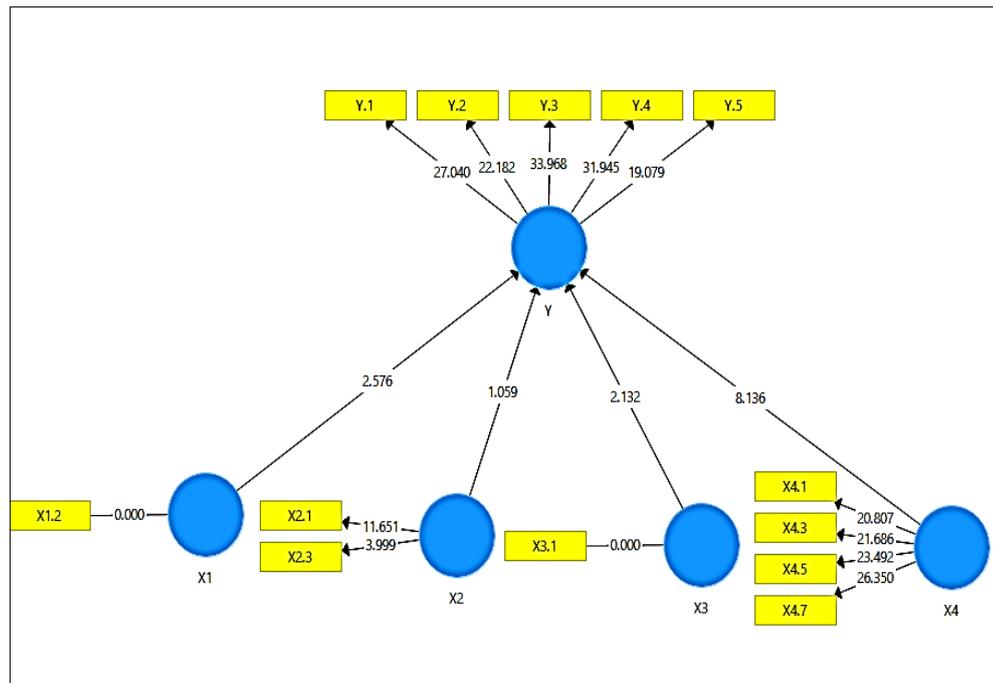
Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable tempat tinggal dengan 7 indikator pertanyaan terdapat 3 indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, dengan nilai loading faktor $0,689$; $0,005$; $0,323 <$ dari nilai Rule of Thumb $0,70$.



Gambar 4.23 First Outer Loading

Berdasarkan tabel convergent validity indikator konstruk pada masing-masing variabel, maka dapat di kemukakan bahwa untuk indikator konstruk pada variabel tingkat kemiskinan yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk Y_F6, Variabel tingkat pendapatan yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk X1_P1. Variabel tingkat pendidikan yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk X2_T2, Variabel tanggungan keluarga yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk X3_J2, dan Variabel tempat tinggal yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk X4_K2, X4_K4, X4_K6.

Ketentuan dalam analisis convergent validity, jika nilai loading factor tidak terpenuhi maka indikator konstruk dibuang dan dilakukan analisis convergent validity kembali. Adapun hasil analisis convergent validity setelah indikator-indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai loading factor dibuang dapat dikemukakan pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.24 Second Outer Loading

Hasil model pengukuran menggunakan convergent validity pada tahap kedua pada indikator konstruk pada masing-masing variabel dapat dikemukakan dibawah ini:

1. Convergent Validity pada Tingkat Kemiskinan

Dalam Indikator konstruk pada variabel tingkat kemiskinan tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan berjumlah 5 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.22
***Convergent Validity* Faktor Kemiskinan**

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
Y_F1	0,936	0,70	Memenuhi
Y_F2	0,911	0,70	Memenuhi
Y_F3	0,948	0,70	Memenuhi
Y_F4	0,923	0,70	Memenuhi
Y_F5	0,899	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable faktor kemiskinan dengan 5 indikator pertanyaan Tidak terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing berada diatas dari nilai Rule of Thumb 0,70.

2. *Convergent Validity* Pendapatan

Dalam Indikator konstruk pada variabel pendapatan tentang pendapatan utama berjumlah 1 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
X1_P2	0,904	0,70	Memenuhi

Tabel 4.23
***Convergent Validity* Pendapatan Utama**

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable faktor kemiskinan dengan 1 indikator pertanyaan Tidak terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing berada diatas dari nilai Rule of Thumb 0,70.

3. *Convergent Validity* Tingkat Pendidikan

Dalam Indikator konstruk pada variabel tingkat pendidikan tentang tingkat

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
X2_T1	0,927	0,70	Memenuhi
X2_T3	0,826	0,70	Memenuhi

pendidikan berjumlah 2 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.24
***Convergent Validity* Tingkat Pendidikan**

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable faktor kemiskinan dengan 2 indikator pertanyaan Tidak terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing berada diatas dari nilai Rule of Thumb 0,70.

4. *Convergent Validity* Jumlah Tanggungan Keluarga

Dalam Indikator konstruk pada variabel tanggungan tentang jumlah

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
-----------	-----------------------	----------------------	------------

tanggungan keluarga berjumlah 1 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.25
***Convergent Validity* Jumlah Tanggungan Keluarga**

X3_J1	0,874	0,70	Memenuhi
-------	-------	------	----------

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable faktor kemiskinan dengan 1 indikator pertanyaan Tidak terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing berada diatas dari nilai Rule of Thumb 0,70.

5. *Convergent Validity* Pada Tempat Tinggal

Dalam Indikator konstruk pada variabel tempat tinggal tentang kondisi tempat tinggal berjumlah 4 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading factor* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.26
***Convergent Validity* Tempat Tinggal**

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thumb</i>	Keterangan
X4_K1	0,874	0,70	Memenuhi
X4_K3	0,938	0,70	Memenuhi
X4_K5	0,920	0,70	Memenuhi
X4_K7	0,920	0,70	Memenuhi

: Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam variable faktor kemiskinan dengan 4 indikator pertanyaan Tidak terdapat indikator pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria, semua sesuai dengan nilai loading faktor masing-masing berada diatas dari nilai Rule of Thumb 0,70.

4.4.2 *Discriminante Validity*

Dalam analisis *discriminant validity* dimana model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk bersifat reflektif dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading* pada masing-masing variabel. Dalam pengujian *discriminant validity* menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE). adapun parameter *cross*

loading dalam menilai nilai *average variance extracted* untuk mengetahui tingkat validitas dari masing-masing indikator konstruk pada setiap variable direkomendasikan lebih besar dari 0,50 ($> 0,50$) (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Hasil analisis *discriminant validity* dapat dikemukakan pada table di bawah ini :

Tabel 4.27
Discriminante Validity Pada Avarage Extracted (AVE)

Variabel	Nilai
Tingkat kemiskinan	0,861
Pendapatan	1,000
Tingkat pendidikan	0,774
Jumlah tanggungan keluarga	1,000
Tempat tinggal	0,856

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel 4.26 memperlihatkan bahwa nilai *average variance extracted* pada masing-masing variable memenuhi kriteria dalam *discriminant validity*, hal ini dinilai dari *average variance extracted* yang lebih besar dari pada 0,50 ($> 0,50$).

4.4.3 Composite Reliability

Dalam melakukan uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Penggunaan *composite reliability* dilakukan untuk meguji reliabilitas suatu konstruk (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Adapun dalam melakukan penilain terhadap *composite reliability* melalui *rule of thumb*, dimana *nilai composite reliability* harus lebih besar dari 0,70 ($> 0,70$). Pengujian reliabilitas pada setiap konstruk juga dapat dilakukan menggunakan *Cronbach's Alpha*, ketentuan dari penilaian dilakukan melalui *rule of thumb*, dimana nilai *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,70 ($> 0,70$). Hasil dari analisis data memperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 4.28
Discriminante Validity Pada Avarage Extracted (AVE)

Variabel	Nilai	Keterangan
Tingkat kemiskinan	0,969	Reliabel
Pendapatan	1,000	Reliabel
Tingkat pendidikan	0,872	Reliabel
Jumlah tanggungan keluarga	1,000	Reliabel
Tempat tinggal	0,960	Reliabel

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel 4.27 memperlihatkan bahwa nilai *composite reliability* pada variabel Tingkat kemiskinan, Pendapatan, Tingkat pendidikan, Jumlah tanggungan keluarga, dan Tempat tinggal masing-masing sebesar 0.969 ; 1,000 ; 0.872 ; 1,000 dan 0,960 . Seluruh nilai *reliability construct* > 0,70. Maka dalam hal ini keberadaan variabel memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

4.4.4 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam Pengujian pada model strukturan (*inner model*) bertujuan untuk melihat hubungan antara variable. Pengukuran dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang nantinya dapat diketahui tingkat variance terhadap perubahan variable independent terhadap variable dependent. Hasil analisis R-Square ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.29
R-Square

	R-Square
Tingkat Kemiskinan	0,795

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel 4.28 memperlihatkan nilai *R-Square* pada variable tingkat kemiskinan sebesar 0,795. Maka dapat dijelaskan bahwa *variance* pada variabel Pendapatan, Tingkat pendidikan, Jumlah tanggungan keluarga, dan Tempat tinggal mampu menjelaskan variabel tingkat kemiskinan sebesar 0,795 atau sebesar 79%.

4.4.5 Pengujian Hipotesis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SEM-PLS dalam uji hipotesis, maka dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.30
Uji Hipotesis

	Original Sample	T Statistic	P Values	Keputusan
X1 → Y	0,277	0,777	0.437	H0 diterima
X2 → Y	0,035	0,372	0.710	H0 diterima
X3 → Y	0,115	0,707	0.479	H0 diterima
X4 → Y	2,086	1,837	0.066	H0 ditolak

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel 4.29 dapat dijelaskan bahwa ketentuan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai original sample sebagai nilai coefficient atau disebut juga nilai beta. Dalam menetapkan penerimaan atau penolakan pada H0 dalam pengujian hipotesis, dapat dilihat dari nilai pada kolom T Statistic dan nilai pada kolom P Values. Adapun ketentuannya adalah jika nilai t statistic lebih besar dari nilai t table ($t \text{ statistic} > t \text{ tabel}$) pada taraf signifikansi 10 % ($t \text{ table}$ dilihat dari jumlah sampel, dimana sampel pada penelitian ini berjumlah 40 responden) atau menggunakan nilai P Value dengan ketentuan jika $< 0,10$, dimana kesimpulannya tolak H0, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan, begitu juga sebaliknya.

Hasil analisis data :

1. Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan (X1 → Y)

Hasil uji hipotesis Pendapatan memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan berdasarkan tabel 4.29 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar

0,755, sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 0,10% diperoleh sebesar 1,684 berdasarkan jumlah sampel sebesar 40 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$ ($0,777 < 1,684$).

2. Pengaruh Pingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan ($X_2 \rightarrow Y$)

Hasil uji hipotesis Pendapatan memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan berdasarkan tabel 4.29 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 0,372, sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 0,10% diperoleh sebesar 1,684 berdasarkan jumlah sampel sebesar 40 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$ ($0,372 < 1,684$), Ketentuannya H_0 diterima, maka disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

3. Pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap Tingkat Kemiskinan ($X_3 \rightarrow Y$)

Hasil uji hipotesis Pendapatan memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan berdasarkan tabel 4.29 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 0,707, sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 0,10% diperoleh sebesar 1,684 berdasarkan jumlah sampel sebesar 40 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$ ($0,707 < 1,684$), Ketentuannya H_0 diterima, maka disimpulkan bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

4. Pengaruh tempat tinggal terhadap Tingkat Kemiskinan ($X_4 \rightarrow Y$)

Hasil uji hipotesis Pendapatan memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan berdasarkan tabel 4.29 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 1,837, sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 0,10% diperoleh sebesar 1,684 berdasarkan jumlah sampel sebesar 40 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t \text{ statistic} > t \text{ tabel}$ ($1,837 > 1,684$), Ketentuannya H_0 ditolak, maka disimpulkan

bahwa jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Langkat mengalami kenaikan dibandingkan sebelum adanya pandemi Covid-19 sebelum adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang disebabkan penyebaran virus tersebut dan kemudian diikuti oleh berbagai kebijakan pemerintah dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang telah berdampak buruk pada kegiatan ekonomi masyarakat .
2. Program BLT - Dana Desa dianggap mampu membantu pemerintah dalam penanganan kemiskinan penduduk, program BLT - Dana Desa juga membantu perekonomian rumah tangga miskin penerima bantuan karena dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan rumah tangga akan tetapi program BLT - Dana Desa tidak dapat memenuhi kebutuhan menabung bagi rumah tangga miskin karena seluruh pendapatan perbulan digunakan

seluruhnya untuk kehidupan sehari – hari. Dalam hal penyaluran program BLT - Dana Desa juga dinilai sangat baik .

3. Berdasarkan hasil penelitian, dari 4 variabel X yang di uji terdapat 3 variabel yang dinilai berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y) yaitu pendapatan utama, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga. Dan terdapat 1 variabel yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yaitu kondisi tempat tinggal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, adapun saran sebagai berikut:

Pemerintah lebih aktif dalam penanganan kemiskinan di masa transisi Pandemi Covid-19 menuju masa setelah Pandemi Covid-19 agar angka kemiskinan di Kabupaten Langkat kembali mengalami penurunan. Dengan berbagai macam kebijakan pemerintah dalam penanganan kemiskinan diharapkan berjalan dengan baik. salah satunya dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Langkat agar lebih di perhatikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Oktaviani Musri., (2020)., Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan, Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Badan Pusat Statistka (BPS) 2021. Persentase Penduduk Miskin Pedesaan Dan Perkotaan September 2020- September 2021. BPS [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistka (Bps) 2021. Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2014-2021(%Populasi). Bps [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistka (BPS) 2021. Pencapaian Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021. BPS [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistka (Bps) 2021. Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2021. Bps [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistka (BPS) 2021. Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Langkat Maret 2010- September 2020. BPS [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistka (Bps) 2021. Grafik Perkembangan Kemiskinan Di Sumatera Utara Maret 2017 - September 2021. Bps [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistka (Bps) 2021. Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia 2014-2021 (Juta Orang). Bps [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistka (Bps) 2021. Kecamatan Brandan Barat Dalam Angka 2020. Bps [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistka (Bps) 2022. Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022. Bps [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).
- Badan Pusat Statistka (Bps) 2022. Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022. Bps [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id).

- Badan Pusat Statistka (Bps) 2022. Indonesia Dalam Angka 2022.
Bps [Www.Bps.Go.Id](http://www.Bps.Go.Id).
- Ghozali, imam, Hengky Latan, (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan smart-PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*, Semarang: BP UNDIP
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafik.
- kuncorondo Persada. Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Pengurangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi dan 35 Kabupaten Prioritas Tahun 2021., tnp2k.go.id.
- Stevianus Laoh, Martha M. Sendow, Melissa L.G. Tarore., (2016) , *Evaluasi Proses Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, Agri-Sosioekonomi Unsrat, Volume 12 Nomor 2A*.
- Theresia Anggi Tiovani,(2021). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk,Pdrb,Dan Kesempatan Kerja Terhaap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. *Repository.Usu.Ac.Id*
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas)*. Jakarta: Erlangga

LAMPIRAN

KUISIONER

**Evaluasi rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa
(BLT- Dana Desa) di Kecamatan Brandan Barat**

Hari / Tanggal :	
Surveyor	
I. Data Pribadi	
Nama	
Alamat	
Jenis Kelamin	A)Laki-Laki B) Perempuan
Pendidikan Terakhir	A) SD/ Tidak sekolah B) SMP C) SMA/SMK D) DIPLOMA E)S1
Usia	A) 25 – 35 Tahun B) 36 – 50 Tahun
Status Pekerjaan	A) Nelayan pemilik kapal/perahu D) Guru B) Nelayan penyewa perahu/kapal E) Lainnya..... C) Pedagang / pelaku UMKM
Pendapatan	A) < Rp. 500.000 B) Rp. 500.000 – Rp. 700.000 C) Rp. 700.000 – Rp. 900.000 D) > 900.000
Sumber pendapatan	A) Pekerjaan utama B) Penghasilan dari anggota keluarga lainnya
Pengeluaran	A) < Rp. 500.000 B) Rp. 500.000 – Rp. 700.000 C) Rp. 700.000 – Rp. 900.000 D) > 900.000

PERTANYAAN KHUSUS

Petunjuk Pengisian :

Isilah jawaban sesuai pendapat anda dengan berikan tingkat penilaian dengan checklist (√) pada kolom yang tersedia.

Jawaban yang tersedia berupa skala likert, yaitu antara 1-5 yang mempunyai arti :

1 = Sangat Tidak Benar/ Setuju/ Mudah/ Sesuai/ Pernah

2 = Tidak Benar/Kurang Setuju/Tidak Mudah/ Tidak Sesuai/Tidak Pernah

3 = Netral/ Cukup

4 = Benar/ Setuju/ Mudah/ Sesuai/ Pernah

5 = Sangat Benar/ Sangat Setuju/ Sangat Mudah/ Sangat Sesuai/ Sangat Pernah

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

II. PENDIDIKAN

1. Tingkat pendidikan yang telah anda capai akan berpengaruh terhadap kinerja anda.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

2. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah anda capai akan semakin baik kinerja yang anda hasilkan.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

3. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, semakin banyak ilmu yang dapat diterapkan dalam pekerjaan anda.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

II. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA

1. Jumlah tanggungan keluarga :
 - a. 2 orang

- b. 3 orang
- c. 4 orang
- d. 5 orang
- e. Lainnya.....

2. Jumlah tanggungan keluarga usia sekolah

- a. 1 orang
- b. 2 orang
- c. 3 orang
- d. 4 orang
- e. Lainnya.....

III. KONDISI TEMPAT TINGGAL

1. Bagaimana status kepemilikan rumah ?

- a. Milik pribadi
- b. Milik orang tua
- c. Kontrak/Sewa
- d. Menumpang pada keluarga

2. Jenis lantai tempat tinggal terluas:

- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Marmer/granit | f. Semen/bata merah |
| b. Keramik | g. Bambu |

- c. Parket/vinil/permadani
- d. Ubin/tegel/teraso
- e. Kayu/papan kualitas tinggi
- h. Kayu/papan kualitas rendah
- i. Lainnya.....

3. Dinding sebagian besar rumah:

- a. Semen/beton/kayu berkualitas tinggi
- b. Kayu berkualitas rendah/bamboo
- c. Lainnya.....

4. Penerangan rumah:

- a. Listrik PLN
- b. Listrik non PLN
- c. Lampu minyak/lilin
- d. Sumber penerangan lainnya.....

5. Energi untuk memasak:

- a. Gas kota/LPG/biogas
- b. Minyak tanah/batu bara
- c. Kayu bakar
- d. Lainnya

6. Fasilitas MCK:

- a. Sendiri
- b. Berkelompok/tetangga
- c. MCK umum
- d. Tidak ada

7. Fasilitas buang air besar:

- a. Jamban sendiri
- b. Jamban bersama/tetangga
- c. Jamban umum
- d. Lainnya.....

8. Sumber air minum terbanyak dari:

- a. Ledeng/perpipaan berbayar/air isi ulang/kemasan
- b. Mata air/perpipaan/sumur
- c. Sungai, danau, embung
- d. Tadah air hujan
- e. Lainnya.....

IV. JENIS BANTUAN YANG DITERIMA

- BLT Dana Desa :
- Program Keluarga Harapan/PKH:
- Bantuan Sosial Tunai /BST:
- Bantuan Presiden/Banpres:
- Bantuan UMKM:
- Bantuan untuk pekerja
- Bantuan pendidikan anak
- Lainnya

1. Lama menerima bantuan:

- a. < 1 tahun

- b. 1 tahun
 - c. 2 tahun
 - d. > 2 tahun
2. Jumlah yang di terima:
- a. Rp. 300,000
 - b. Rp. 600,000
 - c. Rp. 1,000,000
 - d. Rp. 1,200,000
 - e. Lainnya.....
3. Waktu menerima :
- a. 1 bulan sekali
 - b. 3 bulan sekali
 - c. 6 bulan sekali
 - d. Lainnya.....

I. Kemudahan Penggunaan

1. Program BLT yang telah berjalan mampu mengentaskan kemiskinan.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

2. Prosedur program BLT mudah dipahami.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

3. Program BLT sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok

sehari-hari.

1 2 3 4 5

4. Program BLT mampu untuk menambah pemenuhan untuk menabung bagi penerima BLT setiap bulannya.

1 2 3 4 5

5. Program bantuan pemerintah lain lebih berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan.

1 2 3 4 5

II. Kecukupan Kebutuhan Dasar

1. Program BLT mampu meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Makan Sehari-hari bagi.

1 2 3 4 5

2. Penerima BLT Program BLT mampu untuk meningkatkan pemenuhan Kebutuhan Sandang bagi penerima BLT.

1 2 3 4 5

3. Program BLT telah mampu untuk meningkatkan Pemenuhan Penghasilan Tetap/Pekerjaan bagi penerima BLT.

1 2 3 4 5

4. Program BLT mampu untuk menambah pemenuhan untuk

menabung bagi penerima BLT setiap bulannya.

1 2 3 4 5

5. Program bantuan pemerintah lain lebih berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan.

1 2 3 4 5

III. Kecukupan Kebutuhan Dasar

1. Penyaluran dana program BLT sudah sangat tepat waktu.

1 2 3 4 5

2. Pembagian dana program BLT dilakukan secara merata hanya kepada rumah tangga miskin.

1 2 3 4 5

3. Program BLT tidak sesuai harapan masyarakat miskin.

1 2 3 4 5

4. Program BLT mampu untuk menambah pemenuhan untuk menabung bagi penerima BLT setiap bulannya.

1 2 3 4 5

No.	X1.1	X1.2
1.	2	1
2.	1	2
3.	3	1
4.	2	1
5.	2	2
6.	1	2
7.	1	1
8.	2	1
9.	2	1
10.	2	1
11.	3	1
12.	3	1
13.	2	1
14.	3	1
15.	2	1
16.	2	1
17.	2	1
18.	1	2
19.	2	2
20.	1	2
21.	3	1
22.	1	2
23.	1	2
24.	1	2
25.	2	1
26.	4	1
27.	2	1
28.	2	2
29.	2	1
30.	3	1
31.	3	1

		Jawaban Variabel Pendapatan		Jawaban Variabel Pendidikan			
		No.	X3.1	X3.2	X2.1	X2.2	X2.3
32.	2	1					
33.	2	1					
34.	3	1.	3	1.	5	4	5
35.	3	2.	2	2.	5	5	5
36.	3	3.	3	3.	5	4	4
37.	2	4.	1	4.	4	3	4
38.	2	5.	3	5.	5	5	5
39.	2	6.	4	6.	4	4	4
40.	3	7.	2	7.	5	4	4
		8.	2	8.	4	4	4
		9.	1	9.	4	4	5
		10.	1	10.	4	3	3
		11.	3	11.	4	5	4
		12.	1	12.	2	3	3
		13.	1	13.	2	3	3
		14.	2	14.	4	5	4
		15.	2	15.	4	4	4
		16.	3	16.	4	5	4
		17.	2	17.	3	3	3
		18.	3	18.	5	4	4
		19.	2	19.	3	4	5
		20.	2	20.	4	4	4
		21.	1	21.	4	4	5
		22.	3	22.	4	4	4
		23.	2	23.	5	4	5
		24.	1	24.	4	4	4
		25.	3	25.	5	4	5
		26.		26.	5	5	5
		27.		27.	5	4	4
		28.		28.	5	4	4
		29.		29.	5	4	4
		30.		30.	5	5	5
		31.		31.	5	4	4
		32.		32.	5	4	4
		33.		33.	4	4	4
		34.		34.	5	4	4
		35.		35.	5	4	5
		36.		36.	3	4	4
		37.		37.	4	4	4
		38.		38.	5	4	4
		39.		39.	3	4	3
		40.		40.	4	4	4

Jawaban
Variabel
Jumlah
Tanggungan
Keluarga

26.	3	2
27.	3	2
28.	2	5
29.	2	1
30.	3	2
31.	3	1
32.	2	1
33.	2	5
34.	2	1
35.	4	2
36.	2	1
37.	1	5
38.	3	1
39.	2	5
40.	2	1

Jawaban variabel kondisi tempat tinggal

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8
1.	2	7	2	1	1	1	1	2
2.	1	5	1	1	1	1	1	2
3.	2	4	2	2	2	2	1	2
4.	1	7	2	2	1	2	1	2
5.	3	7	2	1	1	1	1	2
6.	1	2	1	1	1	1	1	2
7.	2	5	1	1	1	1	1	2
8.	1	7	2	1	1	1	1	2
9.	1	5	1	1	2	1	1	2
10.	3	4	2	1	1	1	1	2
11.	1	2	1	1	1	1	1	2
12.	2	2	1	1	1	1	1	2
13.	1	4	2	1	1	1	1	2
14.	2	7	2	1	1	1	1	2
15.	1	7	1	1	1	1	1	2
16.	2	2	1	1	1	1	1	2
17.	3	2	1	1	1	1	1	2
18.	1	3	1	1	1	1	1	2
19.	3	2	2	1	1	1	1	2
20.	3	4	2	1	1	1	1	2
21.	2	3	1	1	1	1	1	2
22.	2	2	2	1	1	1	1	2
23.	1	7	2	2	2	2	1	2
24.	1	7	2	1	2	1	1	1
25.	2	5	1	1	1	1	1	2
26.	2	5	1	1	1	1	1	2
27.	2	7	2	1	1	1	1	2
28.	1	7	2	1	2	1	1	2
29.	1	7	2	1	1	1	1	2
30.	2	5	1	1	1	1	1	1
31.	1	5	1	1	1	1	1	1
32.	1	7	2	1	1	1	1	1
33.	1	7	2	1	2	1	1	2
34.	2	5	1	1	1	1	1	2
35.	1	5	1	1	1	1	1	2
36.	1	5	2	1	1	1	1	2
37.	1	7	2	1	1	1	1	1
38.	1	5	1	1	1	1	1	1
39.	1	7	2	1	2	1	1	1
40.	2	7	2	1	1	1	1	2

Jawaban Variabel Tingkat Kemiskinan

No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.	4	5	5	5	3	4
2.	4	4	5	1	4	5
3.	5	5	5	3	4	5
4.	5	4	5	2	4	4
5.	3	3	3	1	2	3
6.	1	1	2	2	2	2
7.	5	5	4	1	5	5
8.	4	3	4	4	3	4
9.	5	5	5	2	5	4
10.	4	3	4	4	4	4
11.	4	4	4	4	4	4
12.	3	3	3	4	4	4
13.	4	4	4	4	4	4
14.	5	4	5	1	4	5
15.	5	4	4	4	4	4
16.	1	1	1	1	1	1
17.	1	1	1	1	1	2
18.	5	4	5	4	4	4
19.	3	4	2	1	1	3
20.	1	1	1	1	1	2
21.	4	5	4	5	5	4
22.	1	2	1	1	1	2
23.	5	4	5	2	5	5
24.	4	4	4	2	4	5
25.	5	4	5	2	4	4
26.	4	5	4	5	5	4
27.	4	5	4	4	4	5
28.	5	4	4	2	5	4
29.	5	4	4	2	4	4
30.	5	4	5	2	4	4
31.	5	5	5	3	5	5
32.	5	5	5	1	4	4
33.	5	5	5	1	4	4
34.	5	4	4	5	4	5
35.	4	4	4	2	4	5
36.	4	5	5	1	5	5
37.	5	5	5	1	5	4
38.	5	4	4	2	4	5
39.	4	4	4	1	5	5
40.	5	4	4	1	4	4